

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat pada pemerintah ditingkat bawahnya memberi pengaturan serta mengurus wilayahnya sendiri dapat dikatakan Desentralisasi. Di Indonesia desentralisasi diimplementasikan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah, di harapkan akan bisa memberi pelayanan yang paling baik pada masyarakat. sebab adanya Otonomi Daerah, Daerah bebas dalam menjalankan berbagai perilaku yang sama dengan situasi masyarakat di wilayah tersebut.

Pada dasarnya otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai hak, wewenang serta kewajiban daerah agar dapat memberikan aturan serta mengurus keluarga sendiri. Hak ini didapatkan melewati pemberian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Pemda) sama dengan situasi serta kemampuan daerah yang berkaitan. Munculnya otonomi daerah melambangkan bentuk pada penerapan prinsip desentralisasi, dan daerah harapannya bisa memberikan pelayanan yang paling baik pada masyarakat. Kekuasaan yang diperoleh di wilayah tersebut akan memberikan kebebasan bagi wilayah tersebut. Kebebasan yang diberikan kepada daerah adalah bahwa daerah dapat secara bebas bertindak sama pada keadaan dan keinginan penduduknya di dalam wilayah tersebut. Karena pada dasarnya pemda lebih dekat dengan penduduk setempat, maka pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat.¹

Salah satu tujuan penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah yang bisa disebut Otonomi Daerah ialah melakukan pembangunan kemandirian desa. Perihal tersebut sama pada pertimbangan di buatnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dengan adanya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, harapannya bisa mengatasi masalah yang terdapat pada desa, mulai pada sosial, budaya serta ekonomi. Seperti yang dikatakan Ketua Badan Pemberdayaan

¹ Sakinah Nadir. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik Vol. 1 No. 1. 2013.

Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur, Drs H Zarkasi, M.Si., “adanya Undang-Undang itu, memberikan peningkatan partisipasi serta gotong royong penduduk didalam pembangunan desa. kemudian, mempercepat dalam membangun desa serta kawasan perdesaan untuk menciptakan kesejahteraan penduduk desa.” Drs H Zarkasi, M.Si., juga menyebutkan bahwa dengan adanya Undang-Undang itu nantinya memperkuat desa sebagai wujud penduduk yang mandiri.²

Selain memperkuat desa sebagai wujud penduduk yang mandiri, dengan adanya Undang-Undang Desa, desa mempunyai lebih banyak kesempatan untuk membangun desa dalam rangka upaya menurunkan tingkat kemiskinan di desa atau meningkatkan perekonomian desa dan desa tersebut menjadi mandiri dalam pengelolaan perekonomian tersebut. Selain desa menjadi mandiri, desa juga mendapat beberapa sumbangan dana dari pempus yang di sebut Dana Desa (DD). Selain Dana Desa (DD) desa pun memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) serta dana lain nya dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota ataupun Pemerintah Provinsi. Salah satu tujuan utama desa dalam menggunakan dana desa ialah agar dapat membayai implementasi program serta aktivitas dibidang pembangunan desa serta pemberdayaan penduduk. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dana desa di alokasikan dari pemerintah supaya desa pengalokasian DD dihitung bersumber total keseluruhan desa serta dialokasikan dengan cara memperhatikan keseluruhan masyarakat, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkatan kesulitan geografis. DD itu dikelola dengan cara tertib, taat kepada ketentuan aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan dan memprioritaskan keperluan penduduk setempat.³

² Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, 2014. *UU Desa dan Kemandirian Pemerintahan Desa*, melalui <http://dpmd.jatimprov.go.id/home-mainmenu-1/90-berita/570-uu-desa-dan-kemandirian-pemdes> (diakses 13 Mei 2020 pukul 14:44)

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Dana desa mulai diimplementasikan ditahun 2015. Pada awal realisasi dana desanya tahun 2015 sebanyak Rp 20,8 triliun, realisasi dana tersebut 100% pada target APBN 2015. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan realisasinya dana desa dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 46,7 triliun atau sebesar 99,4% pada target APBN ditahun 2016. Dan pada tahun setelahnya realisasi DD semakin meningkat, Pada tahun 2017 realisasi DD sebanyak Rp 59,8 triliun ataupun 99,6% pada target APBN ditahun 2017. Pada tahun 2018 realisasi DD menggapai Rp 59,9 triliun ataupun 99,77% pada target APBN 2018. Serta dalam tahun 2019 pemerintahan mengalokasikan DD sebanyak Rp 70 triliun.⁴ Dengan adanya kenaikan dana desa setiap tahunnya perihal itu menunjukkan komitmen pemerintah agar dapat menjalankan UU desa terkhususnya yang berkaitan dengan DD.

Peningkatan jumlah alokasi dana desa ini sudah di rasakan oleh salah satu provinsi, khususnya provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017 provinsi Jawa Timur menerima jumlah total dana desa yaitu Rp. 6,33 triliun, dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 6,36 triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2019 DD yang di terima oleh Pemprov Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi Rp. 7,41 triliun. Jumlah dana desa tersebut nantinya dibagikan pada 7.724 desa yang berada dalam 29 Pemkab serta 1 pemkot yakni Kota Batu. Besanya dana desa itu bisa di lihat dalam tabel dibawah ini;

⁴ Dwi H J, 2019, *Realisasi Dana Desa 2015-Agustus 2019*, melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/27/berapa-realisasi-dana-desa-hingga-agustus2019> (diakses 19 Februari 2020 pukul 11:36)

Tabel I.1 Besaran Dana Desa yang Diterima Oleh Kabupaten di Jawa Timur
Tahun 2017, 2018, dan 2019

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI TAHUN		
			2017	2018	2019
1	Kab. Pacitan	166	134.532.774	126.503.528	145.072.735
2	Kab. Ponorogo	281	225.521.779	216.309.473	252.106.956
3	Kab. Trenggalek	152	126.272.213	127.827.455	148.700.015
4	Kab. Tulungagung	257	203.074.565	205.680.279	233.413.883
5	Kab. Blitar	220	178.027.258	164.197.753	185.804.655
6	Kab. Kediri	343	278.633.039	272.006.205	310.974.159
7	Kab. Malang	378	312.979.737	320.340.658	365.827.590
8	Kab. Lumajang	198	165.136.155	164.055.106	189.221.532
9	Kab. Jember	226	205.006.634	237.360.038	285.367.067
10	Kab. Banyuwangi	189	172.183.366	171.594.506	200.471.705
11	Kab. Bondowoso	209	173.908.433	197.476.931	230.866.115
12	Kab. Situbondo	132	111.434.587	115.414.807	133.156.458
13	Kab. Probolinggo	325	271.486.142	324.435.332	392.410.257
14	Kab. Pasuruan	341	275.500.861	302.571.464	362.897.025
15	Kab. Sidoarjo	322	261.930.612	253.643.547	295.899.068
16	Kab. Mojokerto	299	236.465.127	208.462.404	235.653.897
17	Kab. Jombang	302	244.245.613	238.494.888	274.889.392
18	Kab. Nganjuk	264	215.210.307	239.042.120	278.092.493
19	Kab. Madiun	198	158.196.624	142.881.185	162.170.498
20	Kab. Magetan	207	162.234.334	148.190.103	167.714.460
21	Kab. Ngawi	213	177.370.519	168.572.918	192.609.327
22	Kab. Bojonegoro	419	332.980.300	317.899.182	367.201.310
23	Kab. Tuban	311	252.388.557	225.648.488	256.256.128
24	Kab. Lamongan	462	363.423.524	322.012.143	367.123.481
25	Kab. Gresik	330	262.070.980	246.315.128	280.483.802
26	Kab. Bangkalan	273	226.559.736	268.326.025	330.890.066
27	Kab. Sampang	180	167.492.597	179.596.216	232.543.589
28	Kab. Pamekasan	178	154.653.592	165.936.185	198.798.859
29	Kab. Sumenep	330	271.773.005	276.309.656	338.395.871
30	Kota Batu	19	18.852.611	21.641.636	26.548.999
JUMLAH		7.724	6.339.556.181	6.368.745.359	7.441.561.392

Sumber: Kemenkeu RI, diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut, ada beberapa daerah yang menerima DD paling besar di pemprov Jawa Timur. Tiga daerah yang menerima DD paling besar ialah Kabupaten Probolinggo mendapat kucuran dana desa sebesar Rp. 392,410 miliar, dan disusul oleh Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Bojonegoro menerima DD sebanyak Rp. 367,201 miliar, dan Kabupaten Lamongan menerima dana desa sebesar Rp. 367,123 miliar.

Terdapatnya dana desa sehingga penduduk desa di tuntut supaya lebih pandai didalam memahami potensi yang berada atau dimiliki oleh desa. Kekayaan SDA, serta potensi yang di miliki oleh desa ialah anugerah yang di miliki semua warga desa, oleh karena itu pengelolaan nya haruslah mengikutsertakan partisipasi semua penduduk desa. Dana desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada desa dianjurkan untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa ketimbang Infrastruktur. Direktur Jendral Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian desa PDTT Taufik Majid, mengemukakan, “Dana Desa 5 tahun ke depannya nantinya di prioritaskan pada pemberdayaan penduduk serta pengembangan ekonomi, dimana didalamnya juga terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.⁵ Pemrioritasan BUMDes oleh DD ini supaya daerah tersebut mempunyai roda perekonomian.⁶

Adanya BUMDes sabagai bagian dari prakttik menuju kemandirian, karena Badan Usaha Milik Desa adalah rancangan program pengembangan basisi perekonomian di pedesaan. BUMDes pun sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang nantinya untuk menggerakan roda perekonomian bagi masyarakat desa yang di kelola dengan cara langsung dari masyarakat bersamaan dengan pemerintahan desa tanpa adanya intervensi pemerintahan di atasnya.⁷ Dengan UU Nomor. 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa membentuk BUMDes supaya memanfaatkan semua potensi perekonomian serta potensi SDA serta manusia untuk memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. BUMDes ialah badan usaha yang bercirikan desa, yang tidak hanya membantu pemdes dalam pengelolaannya, tetapi juga penuhi keperluan penduduk desa. BUMDes juga bisa menjalankan fungsinya berupa jasa, perdagangan, serta pembangunan perekonomian lain. Dengan Undang-

⁵ Tessa Sanduk, 2019. *Pengembangan Ekonomi BUMDes Minta Diprioritas*, melalui <https://zonautara.com/2019/08/23/pengembangan-ekonomi-bumdes-minta-diprioritas/> (diakses 14 Maret 2020 pukul 21:31)

⁶ Koran Sindo, 2019. *Dana Desa Diprioritaskan untuk BUMDes*, melalui <https://nasional.sindonews.com/read/958789/149/dana-desa-diprioritaskan-untuk-bumdes-1422849042> (diakses 14 Maret 2020 pukul 22:15)

⁷ Isfana, 2016. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwujudan Kemandirian Desa di Era Otonomi*, melalui <https://paragrafbaru.wordpress.com/2016/06/05/badan-usaha-milik-desa-bumdes-perwujudan-kemandirian-desa-di-era-otonomi/> (diakses 14 Mei 2020 pukul 13:46)

Undang Nomor. 6 Tahun 2014, pendirian serta pembentukan BUMDes semakin memperkuat posisi ekonomi masyarakat desa.⁸

Dalam menjalankan tugasnya, BUMDes berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 mengenai BUMDes serta Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa, memperoleh lebih banyak kesempatan agar dapat memberikan peningkatan peran didalam pembangunan perekonomian penduduk pedesaan. Sehingga, Kemendes Pembangunan Daerah Miskin dan Migrasi (Kemendesa PDTT) pun telah menerbitkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 mengenai Pembentukan, Pengurusan serta Pengelolaan BUMDes serta Pembubarannya.

Didalam Peraturan Kemendesa PDTT pun telah menerbitkan Permendes No.4 tahun 2015, mengenai Pembentukan, Pengurusan, Pengelolaan serta Pembubaran BUMDes, Pasal tiga menjelaskan beberapa tujuannya didirikannya BUMDes, antara lain: a. Memberikan peningkatan ekonomi desa; b. Memaksimalkan potensi desa supaya memiliki manfaat dalam mensejahterakan desanya; c. Memberikan peningkatan usaha penduduk didalam pengelolaan potensi perekonomian desa; d. Melakukan pengembangan rencana kerjasama usaha antara desa serta ataupun dengan pihak ke-3; e. Membuat peluang serta jaringan pasar yang memberikan dukungan kebutuhan layanan umum warga; f. Membuka lapangan kerja; g. Memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melewati perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan serta pemerataan perekonomian desa; serta h. Memberikan peningkatan pendapatan penduduk desa serta penghasilan asli desa.⁹ Kemudian BUMDes pun mempunyai peran terpenting agar dapat memberikan pengembangan usaha desanya serta pembangunan desanya yang meliputi pemberdayaan penduduk desa, serta pemberian bantuan pada penduduk desa, ini tertuang didalam UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa.¹⁰

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹ Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BUMDes di harapkan bisa memberikan peningkatan ekonomi masyarakat desa, selain memberikan peningkatan ekonomi penduduk desa BUMDes juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menambah nya PAD, desa yang tiap tahunnya memerlukan APBDES (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tidak ketergantungan dalam dana kucuran pemerintahan di atasnya.¹¹ Peranan BUMDes didalam memberikan peningkatan perokonomian desa sangatlah strategis sehingga keberadaannya harus dioptimalkan. Seperti yang dikatakan oleh dosen komunikasi pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jendral Soedirman, Adhi Iman Sulaiman, “kebijakan mendirikan BUMDes teramat bagus karena menunjukan keseriusan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi desa.” Adhi Iman Sulaiman juga mengatakan bahwa dalam pengelolaan BUMDes ada hal yang perlu di perhatikan, “implementasi operasional Badan Usaha Milik Desa harus memperhatikan pengelolaan SDM, administrasi keuangan hingga manajemen organisasinya”.¹²

Adanya dasar hukum yang kuat dalam pendirian BUMDes serta alokasi dana desa yang besar untuk pengembangan BUMDes, tidak semua BUMDes berjalan lancar. Banyak BUMDes yang dirancang agar dapat pembangunan perekonomian desa masih banyak yang mati, mayoritas BUMDes yang ada tidak jalan dan belum mampu memberikan pengaruh terhadap pembangunan dan pemberdayaan SDM.¹³ Eksistensi BUMDes di bermacam wilayah bahkan terjadi ketika kondisi tidak mudah serta banyak didalam pengembangannya tidaklah berjalan lancar, seharusnya BUMDes sebagai program strategis dalam pembangunan serta pemberdayaan penduduk. Selain banyaknya BUMDes yang belum berjalan lancar, Badan Usaha Milik Desa ini juga banyak mengalami hambatan-hambatan dalam pengembangannya. Berbagai perihal yang membikin

¹¹ Isfana, 2016. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwujudan Kemandirian Desa di Era Otonomi*, melalui <https://paragrafbaru.wordpress.com/2016/06/05/badan-usaha-milik-desa-bumdes-perwujudan-kemandirian-desa-di-era-otonomi/> (diakses 15 Mei 2020 pukul 11:46)

¹² Wuryanti Puspitasari, 2018. *BUMDes berperan tingkatkan ekonomi desa*, melalui <https://jateng.antaranews.com/berita/206785/bumdes-berperan-tingkatkan-ekonomi-desa> (diakses 15 Mei 2020 pukul 12:12)

¹³ Beritatkp, 2017, *Gathering BUMDes Se-Kabupaten Blitar BUMDes Sehat Masyarakat Sejahtera*, melalui <https://www.beritatkp.com/19149/gathering-bumdes-se-kabupaten-blitar-bumdes-sehat-masyarakat-sejahtera.html> (diakses 28 Mei 2020 pukul 19:27)

BUMDes ini tidak mampu menjadi mesin pendorong kesejahteraan warga, antara lain; a. perangkat desa utamanya kepala desa teramat kurang memahami tentang BUMDes, b. perangkat desa belum paham wewenang yang di miliki desa meskipun udah terdapat UU No.6 Tahun 2014 mengenai desa, c. pembangunan desa selalu dipahami dengan pemahaman pembangunan fisik serta atas arahan struktur dari atas, d. kurangnya transparansi antara elite desa pada warga penduduk tentang bermacam isu yang harusnya di komunikasikan, maka membuat warga desa tidak tahu isu tentang Badan Usaha Milik Desa, e. banyaknya penyalahgunaan kekuasaan elite desa sehingga menjadikan banyak elite desa yang korupsi, f. banyak program sebelum Badan Usaha Milik Desa yang gagal, hal tersebut membikin sebagian penduduk desa memiliki pikiran bahwasannya mereka tidak haruslah kembalikan dana yang seharusnya jadi modal untuk usaha desa yang di jalan Badan Usaha Milik Desa, g. BUMDes kurang menarik untuk sebagian besar anak muda maka BUMDes masih di jalankan secara model konvensional sebab di jalankan kaum tua, h. kurangnya SDM yang kurang memadai.¹⁴

Sumber daya manusia sangatlah penting didalam pelaksanaa program organisasi, sumber daya manusia berperan sebagai perencana dan aktor dalam setiap aktivitas pelaksanaan organisasi tersebut. Berjalan atau tidaknya organisasi tersebut pun dipengaruhi oleh SDM, tanpa terdapat SDM yang berkualitas sehingga organisasi tidak bisa menjalankan aktivitasnya secara baik dengan perihalnya didalam organisasi Badan Usaha Milik Desa.¹⁵ Disadari bahwa sangat penting SDM didalam mengoptimalkan fungsinya BUMDes haruslah terdapat langkah nyata yang harus dilakukan untuk lebih memberdayakan SDM yang terdapat. Satu diantara cara agar dapat memberikan peningkatan kualitas oleh penduduk yang berada dipedesaan yang mayoritas masyarakatnya berpendidikan masih rendah

¹⁴ Berdesa.com 2018. 9 *Hal yang Menghambat BUMDes Menjadi Raksasa*, melalui <http://www.berdesa.com/9-hal-menghambat-bumdes-menjadi-raksasa/> (diakses 03 Juni 2020 pukul 12:19)

¹⁵ Geraldty Untu et al. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Di Desa Guuan Kecamatan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 4, No 50, 2018.

adalah dengan pengembangan sumber daya manusia.¹⁶ Dengan memderdayakan masyarakat pengembangan sumber daya manusia ini bisa tercapai, karena pada pemrosesan pemberdayaan penduduk di arahkan dalam pengembangan SDM (dipedesaan).¹⁷ Upaya pemberdayaan masyarakat desa ini juga upaya dari pengembangan masyarakat desa, dimana masyarakat desa ini dikembangkan pada situasi tidaklah ataupun kurangnya berdaya jadi memiliki daya guna menggapai kehidupan jauh lebih baik.¹⁸ Dalam pemberdayaan penduduk desa, di sini penduduk desa bisa membuat peluang usaha yang sama dengan keperluan masyarakat. Dalam hal ini penduduk bisa memberikan penentuan macam usaha yang berorientasi oleh, dari, serta untuk rakyat. Memberdayakan masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, karena dalam proses pemberdayaan tersebut masyarakat desa mampu menciptakan usaha baru dan mempunyai pendapatann yang lebih.¹⁹

Satu diantara pengupayaan agar dapat memberikan kesejahteraan penduduk ialah dengan memberdayakan serta mengikutsertakan masyarakat melalui berbagai kegiatan, antara lain pengembangan usaha perekonomian desa, pengembangan keuangan desa, dan aktivitas yang bisa memberdayakan masyarakat untuk memberikan peningkatan kesejahteraannya.²⁰ Pemberdayaan penduduk mempunyai dua tujuan; a. melepaskan masyarakat dalam kemiskinan serta keterbelakangan, b. memperkuat kedudukan penduduk didalam perekonomian serta dan kekuasaannya. Penduduk yang tidaklah bisa melepaskan diri pada kemiskinan bisa meningkat harkat serta martabatnya akibat adanya pemberdayaan penduduk. Dengan kata lain pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai usaha menciptakan

¹⁶ Slamet hidayat, et al. *Pembangunan Sumber Daya Manusia (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12, No. 2, 2018.

¹⁷ Mardikanto, Totok. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

¹⁸ Tonny, Fredian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹⁹ Mardikanto, Totok. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

²⁰ Tempoh, J. *Peranan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*. Jurnal Eksekutif, 2(1). 2013.

masyarakat miskin menjadi mampu dan mandiri.²¹ Dengan didirikannya BUMDes, di harapkan BUMDes ini bertujuan supaya memberdayaan dalam masyarakat pedesaan, dalam hal ini BUMDes mempunyai peran terpenting bagi kehidupan penduduk desa.²²

Langkah nyata yang di ambil oleh Provinsi Jawa Timur dalam memberdayakan masyarakat menggunakan upaya menjadikan BUMDes sebagai basis penguat perekonomian lokal. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa telah dilakukan semenjak di sahkannya peraturan mengenai BUMDes. Hampir di setiap kabupaten di wilayah Jawa Timur mempunyai BUMDes. BUMDes dibangun sejalan dengan asset yang dimiliki oleh desa serta kebutuhan masing-masing desa. Di Provinsi Jawa Timur ini ada beberapa kategori. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemprov Jatim, Mochammad Yasin menyampaikan bahwa di Jawa timur sudah ada banyak BUMDes yang didirikan meskipun tidaklah semua dilakukan secara lancar, Mochammad Yasin juga mengkategorikan beberapa Badan Usaha Milik Desa menjadi 3 kelompok yaitu; BUMDes kategori rintisan, berkembang, serta maju. BUMDes rintisan pada umumnya sudah memiliki nama, pengurus, dan surat keterangan namun belum ada kegiatan atau aktivitas ekonomi di dalam BUMDes; sementara BUMDes yang berkategori berkembang sudah memiliki nama, pengurus, surat keterangan, memiliki bangunan fisik, serta aktifitas ekonomi dan mempunyai keuntungan dalam skala kecil sampai menengah; sedangkan BUMDes berkategori maju telah menunjukkan adanya sistem manajemen yang baik, aktivitas ekonomi skala luas, mempunyai keuntungan dalam skala menengah sampai atas, dan memiliki dampak sosial terhadap lingkungan sekitarnya.²³ Kategori BUMDes di Provinsi Jatim ini bisa di lihat ditabel dalam tabel dibawah ini:

²¹ Mardikanto, Totok. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hlm. 51.

²² Aziz Ratna Prasetyo, *Peranan BUMDes dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Dialektika, Vol 9 No.1, 2016, hal. 98.

²³ Sarjono Herry Warsono, 2018. *Indikator Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan (Badan Pendidikan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi).

Tabel I.2 Kategori Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Timur

BUMDes Berkembang	BUMDes Maju	BUMDes Rintisan	Jumlah
2.390 Desa	598 Desa	2.444 Desa	5.432 Desa

Sumber: Republika.co.id

Pada tabel diatas bisa dilihat bahwasannya sudah ada 5.432 Desa pada Provinsi Jatim yang sudah mempunyai BUMDes, dari total 7.724 Desa di Provinsi Jawa Timur dan desa yang belum memiliki BUMDes sebanyak 2.292 Desa. Dari Tabel di atas bisa menunjukan bahwa Badan Usaha Milik Desa di Jawa Timur ini Sebagian besar masuk di kategori rintisan, berdasarkan data yang ada 45 persen BUMDes masuk didalam kategori rintisan, selanjutnya didalam kategori berkembang ada 44 persen BUMDes, dan yang termasuk didalam kategori maju ada 11 persen BUMDes yang terdapat di Jatim. Mochammad Yasin mengkategorikan BUMDes yang ada di Jawa Timur ini berdasarkan dari kelembagaan hingga omset yang dihasilkan.²⁴

Satu diantara pemkab jatim yang di setiap desa rata-ratanya telah mempunyai BUMDes adalah Kabupaten Blitar. Kabid Pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Desa Kabupaten Blitar Anik Nursiamah mengemukakan, Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Blitar bergerak dibidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jenis usaha yang digeluti BUMDes di Kabupaten Blitar menyesuaikan potensinya yang terdapat di setiap desa, misalnya pariwisata hingga simpan pinjam.²⁵ Terdapatnya BUMDes yang dimiliki dari masing-masing desa di Kabupaten Blitar, tidak semua BUMDes yang ada di pemkab Blitar tersebut tidaklah sehat. Seperti yang dikatakan Anik Nursiamah, BUMDes di Pemkab Blitar yang kondisinya sehat hanya sekitar puluhan, menurutnya BUMDes yang kondisinya tidaklah sehat ini merupakan Badan Usaha Milik Desa yang struktur kepengurusannya tidaklah jelas, administrasi tidaklah ditata secara rapi, serta unit usaha yang tidaklah berjalan

²⁴ Dadang Kurnia, 2019, *Sebagian Besar Bumdes Jatim Masuk Kategori Rintisan*, Melalui <https://www.republika.co.id/berita/daerah/jawa-timur/19/12/16/Q2kneh428-Sebagian-Besar-Bumdes-Jatim-Masuk-Kategori-Rintisan> (Diakses 12 April 2020 Pukul 12:28)

²⁵ Didin Cahya, 2019, *Ada Jenis Usaha BUMDes di Kabupaten Blitar dan Raih Prestasi Nasional*, melalui <https://radartulungagung.jawapos.com/read/2019/03/17/125648/ada-jenis-usaha-bumdes-di-kabupaten-blitar-dan-raih-prestasi-nasional> (diakses 13 April 2020 pukul 13:04)

secara baik. Dalam hal ini Anik Nursiamah juga mengatakan bahwa BUMDes di Pemkab Blitar banyak yang tidaklah sehat namun ada beberapa Badan Usaha Milik Desa Di Pemkab Blitar yang mendapat prestasi di tingkatan Pemprov maupun Nasional.²⁶ Pada tahun 2015, BUMDes Sekar Mulia Kedung Banteng Kec.Bakung Pemkab Blitar ini meraih penghargaan terbaik I tingkat Pemprov Jatim, penghargaan itu diberikan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov. BUMDes Sekar Mulia ini memiliki beberapa usaha yang berbasis potensi lokal berupa simpan pinjam, penggemukan kambing dan sapi, serta sewa kios untuk pedagang kecil.

Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 BUMDes yang mewakili Provinsi Jawa Timur, yaitu BUMDes Maju Makmur Minggirsari Kec.Kanigoro Pemkab Blitar ini mendapatkan juara nasional kategori rintisan Eco Agriculture. Setelah mendapat juara nasional kategori Eco Agriculture BUMDes Maju Makmur menjadi pilot project/percontohan BUMDes di pemprov jatim sertapun sebagai tempat study banding dari Pemkab lain, dan luar provinsi utamanya Kawasan Indonesia Timur. Penghargaan itu diberikan oleh Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi dalam aktivitas Rembuk Desa Nasional 2016 yang di selenggarakan pada Jakarta. Kemudian dalam tahun 2017, Kabuapten Blitar juga mengikuti lomba Badan Usaha Milik Desa tingkat Provinsi Jawa Timur yang diwakili BUMDes Lestari Karangsono Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar. Badan Usaha Milik Desa Lestari yang mewakili Kabupaten Blitar tersebut mendapatkan kategori Badan Usaha Milik Desa terbaik I dengan usaha jasa persewaan kiosnya, wisata edukasi, dan produk serta perdagangan (olahan dari buah).²⁷

Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar termasuk desa yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai satu diantara pengupayaan agar dapat memberikan dorongan serta menampung semua aktivitas perekonomian penduduk desa yang masih berkembang sama dengan adat ataupun

²⁶ Hanum Oktavia, 2019, *Ratusan BUMDes di Kabupaten Blitar Kondisinya 'Tidak sehat'*, melalui http://rri.co.id/post/berita/647595/daerah/ratusan_bumdes_di_kabupaten_blitar_kondisinya_tidak_sehat.html (diakses 13 April 2020 pukul 13:25)

²⁷ Beritatkp, 2017, *Gathering BUMDes Se-Kabupaten Blitar BUMDes Sehat Masyarakat Sejahtera*, melalui <https://www.beritatkp.com/19149/gathering-bumdes-se-kabupaten-blitar-bumdes-sehat-masyarakat-sejahtera.html> (diakses 13 April 2020 pukul 13:40)

kebiasaan setempat agar dapat di kelola Bersama oleh pemerintahan desa serta warga sekitar. BUMDes yang didirikan dari Pemerintahan Desa Bersama Lembaga serta perwakilan penduduk Desa Karangsono ini diberi nama BUMDes Lestari. BUMDes Lestari Desa Karangsono resminya sudah didirikan ditahun 2011 dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Nomor. 10 ditahun 2011 pada tanggal 17 maret 2011 dengan Nomor. Notaris 127 pada tanggal 17 maret 2011.²⁸ Unit usaha yang digeluti oleh BUMDes Lestari Desa Karangsono adalah mengolah material mentah hingga jadi bahan jadi, yakni pengolahan makanan serta minuman mencakup produk yang didoleh yaitu: kulit manggis, kacang koro, sari buah blimbing, kripik aneka buah, jambu merah, susu edamame, markisa, sirup blimbing, dan kripik tape. Selanjutnya, BUMDes Lestari Desa Karangsono inipun melakukan pengelolaan kebun belimbing serta jambu. BUMDes Lestari Desa Karangsono juga mempunyai toko yang nantinya untuk memajang dan menjual produk-produk yang sudah di hasilkan oleh BUMDes Lestari Desa Karangsono tersebut. Selain mempunya kebun sendiri, BUMDes Lestari Desa Karangsono melakukan penampungan perolehan panen buah belimbing pada rumah-rumahnya masyarakat. Dalam hal ini BUMDes Lestari Desa Karangsono melibatkan masyarakat didalam aktivitas usaha BUMDes yang mencakupi produk olahan, pengelolaan buah, serta aktivitas wisata agropolitan.²⁹

Sebelum adanya Badan Usaha Milik Desa, Desa Karangsono menemukan permasalahan yaitu belum bisa memanfaatkan potensi desa secara baik, ternyata banyak lahan yang bisa di tanami buah-buah, selain itu masyarakat juga kebingungan pada saat panen raya karena sebelum adanya Badan Usaha Milik Desa masyarakat belum bisa memanfaatkan hasil panen tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa “Lestari”, Mustainudin, “sebelum adanya bumdes ini waktu panen raya pasti harga buah ini jatuh karena masyarakat

²⁸ Profil BUMDes “LESTARI” Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

²⁹ Lendy W, 2018, *BUMDES KARANGSONO, KEMBANGKAN USAHA BERBASIS MASYARAKAT*, melalui <http://pid.ppmid.kemendesa.go.id/index.php/2018/11/30/bumdes-karangsono-kembangkan-usaha-berbasis-masyarakat/> (diakses 14 April 2020 pukul 14:28)

belum bisa memanfaatkan apa yang mereka punya”.³⁰ Desa Karangsono merupakan desa yang didominasi oleh petani serta buruh tani, situasi kehidupan masih didominasi oleh adat pedesaan, dan taraf hidup perekonomian rendah, perihal tersebut dikarenakan penduduk desa secara umum tidak mampu berkembang dengan teknologi yang dipunyai, padahal masih banyak potensi Desa Karangsono yang tidaklah dimiliki desa lainnya, baik itu peternakan, perkebunan, pertanian, industri rumahan, kerajinan tangan dan makanan diolah, tetapi masih berjalan secara individual dan manual/tradisional karena tidak ada sistem yang mengaturnya.

Melihat permasalahan diatas maka Pemdes Karangsono berupaya keras agar dapat membangun suatu sistem yang menjadikan seluruh aktivitas perekonomian penduduk Desa Karangsono lebih memiliki arah serta terencana, sehingga untuk mencapai tujuan Pemerintah Desa Karangsono, solusinya didirikannya wadah dalam bentuk BUMDes. Dengan terdapatnya BUMDes diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih baik bagi perekonomian masyarakat Desa Karangsono. Satu diantara strategi pemerintahan agar dapat mengurangi angka miskin penduduk pedesaan ialah pada mendirikan BUMDes oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Desa Lestari Desa Karangsono ini diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi penduduk yang jauh lebih baik dengan memberi kesempatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kemampuannya melewati program-program yang terdapat di BUMDes Karangsono.

Dari contoh di atas bisa dilihat bahwasannya peranan Badan Usaha Milik Desa terpenting serta vital didalam memberikan kemajuan perekonomian desa khususnya Desa Karangsono Kabupaten Blitar. Menyadari bahwa begitu penting besarnya peran BUMDes didalam meningkatkan perekonomian daerah, terkhususnya di Desa Karangsono. Sudah sewajarnya BUMDes Lestari Desa Karangsono mendapat perhatian lebih banyak. Sebagai usaha agar dapat memberikan peningkatan perekonomian masyarakat di tingkat desa khususnya di Desa Karangsono Kabupaten Blitar, Pemerintahan Kabupaten Blitar melakukan

³⁰ Wawancara dengan Bapak Mustainudin selaku Direktur Utama BUMDes Lestari pada tanggal 20 April 2021 Pukul 11.05

pemberdayaan dengan pembinaan BUMDes. Dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Blitar memberikan dorongan untuk bersemangat, menyediakan sumber, peluang, pemahaman dan juga keahlian serta pelatihan supaya bisa memberikan peningkatan kapabilitas warga penduduk Desa Karangsono Kabupaten Blitar dalam menentukan masa depannya sendiri. Adanya dorongan dari Pemerintah suatu program pengembangan masyarakat ini bisa dikatakan berjalan dengan efektif, karena salah satu dari prinsip pengembangan masyarakat atau biasa disebut *Community Development* menjelaskan bahwa sebuah program pengembangan penduduk haruslah mendasari penyelenggaraannya memiliki tujuan berbentuk identifikasi, dorongan untuk bersemangat, serta pelatihan untuk pimpinan lokalnya.³¹

Pengembangan masyarakat atau biasa disebut *Community Development* hadir sebagai satu diantara perspektif yang dapat dipakai agar dapat melihat respon dan keikutsertaan masyarakat didalam memberikan tanggapan BUMDes yang diselenggarakan dari pemerintah untuk pengembangan perekonomian penduduk pedesaan serta memberi manfaat untuk penduduk sekitar. Dengan adanya program BUMDes dari pemerintah yang memperhatikan prinsip pengembangan masyarakat maka program tersebut berkembang dan masyarakat juga merasakan manfaat dan keuntungannya. Pemakaian konsep *Community Development* didalam kajian ini jadi satu tahapan awal agar dapat melihat pengupayaan pemerintahan Kabupaten Blitar menjalankan pengembangan masyarakat yang memperhatikan masyarakat karena memang konsep *Community Development* menjadi dasar awal penilaian pengembangan suatu masyarakat.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian-penelitian serupa terkait *Community Development* yang dijalankan dari berbagai peneliti dibawah ini:

1. Kajian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat basisnya *Community Development* (Studi Eksploratif pada Kawasan Wisata Sangeh) Oleh I Wayan Edi Arsawan, Ni Made Kariati, dan I Wayan Sukarta (2016) yang menjelaskan, tentang pemberdayaan di

³¹ Fredian Nasdian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kawasan Wisata Sangeh melibatkan generasi muda dan kolaborasi tokoh adat yang nantinya akan menjadi komando dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga hambatan-hambatan dapat diminimalisir. Dalam pemberdayaannya masyarakat di Kawasan Wisata Sangeh menyusun nya sendiri, karena menurut masyarakat sumber daya lokal akan lebih sensitive terhadap nilai-nilai budaya lokal.³²

2. Penelitian yang berjudul Pengembangan Pariwisata di lihat pada Prespektif *Community Development* (Studi dalam Kampung Nelayan Warna-Warni Kenjeran dikota Surabaya) Oleh Arum Winarsih (2019) yang menjelaskan, mengembangkan destinasi wisata Kampung Nelayan Warna-warni Kenjeran dikota Surabaya meliputi tiga bentuk pengembangan, yaitu pengembangan daya tarik wisatawan, pemberdayaan penduduk, serta pengembangan prasarana serta sarana umum ataupun pariwisata. Didalam pengembangan pariwisatanya tidak sejalan dengan prinsip *community development*, karena beberapa hal tidak berjalan secara maksimal, seperti lumpur di bawah jembatan di Surabaya yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, diikuti dengan pemberdayaan yang tidak merata, kurangnya sadar serta inisiatif penduduk dalam melakukan penjagaan kebersihan serta memanfaatkan sarana serta prasarana yang dibangun.³³
3. Penelitian yang berjudul Analisis Prinsip *Community Development* dalam Program Pengendalian *Tuberculosis* (Studi Kasusnya dalam Inovasi Program Gerakan Masyarakat Berantas TB (Gemar Bertasbi) Dikecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto) Oleh Jashinta Silvia (2019) yang menjelaskan, gerakan penduduk

³² I Wayan Edis Arsawan, et al. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Community Development (Studi Eksploratif di Kawasan Wisata Sangeh)*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 6, No. 3. 2016.

³³ Arum Winarsih, 2019. *Pengembangan Pariwisata dilihat dari Prespektif Community Development (Studi pada Kampung Nelayan Warna-Warni Kenjeran Kota Surabaya)*, Skripsi, Universitas Airlangga: Surabaya.

berantas TB (Gemar Bertasbi) ada 4 wujud aktivitas yang di analisis menggunakan prinsip-prinsip *community development*, diantaranya adalah: a). pembentukan kader aktif di setiap desa, b). memberikan peningkatan kerja sama lintas program, c). memberikan peningkatan pengawas minum obat (PMO), dan d). memberikan peningkatan kerja sama pada organisasi sosial TB. Didalam program gerakan masyarakat berantas TB (Gemar Bertasbi) ada sebagian prinsip *community development* ini sudah di terapkan meskipun ada beberapa prinsip *community development* yang belum diterapkan, prinsip *community development* yang sudah diterapkan dengan baik yaitu motivasi, pemberdayaan, partisipasi, keadilan sosial, dan kemitraan. Prinsip *community development* yang belum diterapkan yaitu keberlanjutan.³⁴

4. Penelitian yang berjudul implementasi Prinsip-Prinsip *Community Development* didalam implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera pada Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Oleh Simon J V Silaen (2016) yang menjelaskan, bahwasannya terjadi kesejahteraan keluarga anggota meningkat, upaya meningkatkan penghasilan keluarga berencana, serta penerapan prinsip-prinsipnya *community development* didalam program teramat memberikan bantuan mereka menggapai tujuan keikut sertaan sebagai anggota program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).³⁵
5. Penelitian yang berjudul *The Role of Community Development in Building Critical Health Literacy* Oleh Susie Sykes, Jane Wills dan Keith Popple (2017) yang menjelaskan, adanya hubungan yang

³⁴ Jashinta Silvia B, 2019. *Analisis Prinsi Community Development pada Program Pengendalian Tuberculosis (Studi Kasus pada Inovasi Program Gerakan Masyarakat Berantas TB (Gemas Bertasbi) Di Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)*, Skripsi, Universitas Airlangga: Surabaya.

³⁵ Simon J V Silaen, 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Community Development dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara: Medan.

sama antara tujuan dan proses pengembangan masyarakat dengan proyek literasi kesehatan kritis yaitu sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya proyek membangun kesehatan kritis belum berjalan dengan baik karena munculnya kesenjangan dalam status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat sehingga masyarakat miskin sangat sedikit akses dalam proyek tersebut. pengembangan masyarakat dibutuhkan untuk mencakup dan memajukan literasi kesehatan kritis tersebut agar potensi untuk mengatasi kesenjangan dalam masyarakat dapat benar-benar tercapai.³⁶

6. Penelitian yang berjudul *Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonismahti* Oleh Parhad Keyim (2017) yang menjelaskan, pariwisata ialah satu diantara cara pengembangan penduduk yang mempunyai potensi meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam menjalankan mewujudkan manfaat pariwisata dibutuhkan sistem kolaborasi pemerintah agar dapat mengatur masyarakat secara efisien dan adil serta memperoleh manfaatnya. Dalam prakteknya pengembangan masyarakat melalui pariwisata dengan sistem kolaborasi pemerintah di Finland mengalami kegagalan karena dalam kolaborasi tersebut masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu keputusan.³⁷
7. Penelitian yang berjudul *Rural community development through competitions, prizes, and campaigns: The villagers' perspective* oleh Helle Norgaard, dan Annette Aagaard Thuesen (2021) yang

³⁶ Susie Sykes, Jane Wills & Keith Popple. 2017. *The Role of Community Development in Building Critical Health Literacy*. Community Development Journal. Oxford University Press. DOI: 10.1093/cdj/bsx019.

³⁷ Parhad Keyim. 2017. *Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonismahti*. Journal of Travel Research. DOI: 10.1177/0047287517701858. Journal.sagepub.com/home/jtr.

menjelaskan, bahwa kompetisi, hadiah, dan kampanye dapat dianggap sebagai penggerak pengembangan masyarakat pedesaan. Dalam prakteknya pengembangan masyarakat pedesaan yang didorong oleh kompetisi, hadiah, dan kampanye ini mempengaruhi perkembangan masyarakat desa, masyarakat desa menerima dan beradaptasi dengan adanya kompetisi untuk pengembangan masyarakat. Masyarakat desa juga beranggapan bahwa kompetisi sebagai dorongan kuat bagi perkembangan desa, dan memenangkan hadiah dan menerima pengakuan atas prestasinya adalah sangat penting.³⁸

8. Penelitian yang berjudul *Demonstrating the Value of Community Development: An Inclusive Evaluation Capacity Building Approach in a Non-Profit Aboriginal and Torres Strait Islander Organisation* oleh Alison Rogers (2018) yang menjelaskan, arti penting dalam proses pengembangan masyarakat yang melibatkan masyarakat. Dalam prakteknya masyarakat yang dilibatkan dalam pengembangan masyarakat berupa partisipasi dalam mengevaluasi proses pengembangan tersebut masyarakat dapat memperoleh proses belajar dan pengembangan diri sesuai dengan tujuan pengembangan masyarakat. Bisa dilihat dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa upaya pengembangan masyarakat terletak pada bagaimana pendekatan yang diterapkan dalam merangkul masyarakatnya.³⁹
9. Penelitian yang berjudul *Resourcefulness of locally-oriented social enterprises: Implications for rural community development* oleh Barraket, Eversole, Luke, dan Barth (2019) yang menjelaskan, perusahaan sosial pedesaan membuat penggunaan yang relatif lebih

³⁸ Helle Norgaard & Annete Aagaard Thuesen. 2021. *Rural Community Development through Competitions, Prizes, and Campaigns: The Villagers' Perspective*. Journal of Rural Studies. DOI: doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.03.006

³⁹ Alison Rogers. Et al. 2018. *Demonstrating the Value of Community Development: An Inclusive Evaluation Capacity Building Approach in a Non-Profit Aboriginal and Torres Strait Islander Organisation*. Evaluation Journal of Australasia. Vol 18 (4). Hal. 234-235. DOI: 10.1177/1035719X18803718. Journals.sagepub.com/home/evj

besar dari aset keuangan dan fisik yang diakses melalui jaringan dalam komunitas mereka, sementara perusahaan sosial perkotaan membuat penggunaan yang lebih besar dari aset yang tersedia melalui hubungan perusahaan dan filantropi terstruktur. Sumber daya organisasi diperluas ke fokus pada sumber daya komunitas oleh perusahaan sosial, bermain dengan cara yang berbeda dalam konteks pedesaan dan perkotaan.⁴⁰

10. Penelitian yang berjudul *Role of Women in Sericulture and Community Development: A Study from a South Indian Village* oleh Eswarappa Kasi (2013) yang menjelaskan, Keterlibatan aktif perempuan sangat penting untuk keberhasilan setiap inisiatif pengembangan masyarakat. Hal ini telah terbukti dalam banyak kesempatan di seluruh dunia lebih-lebih di negara-negara berkembang. Misalnya, keberhasilan Self Help Groups (SHGs) di Andhra Pradesh dan negara bagian lain di India adalah karena peran aktif yang dimainkan oleh perempuan. Serikultur ialah sarana terpenting agar dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan perusahaan tanaman, serta ialah kegiatan rumah tangga yang paling tepat. Dalam semua kegiatan ini, perempuan telah menunjukkan keberanian dan melakukan tugas mereka dengan sangat terampil.⁴¹
11. Penelitian yang berjudul *Contemporary strategies for rural community development in Australia: a governmentality perspective* oleh Lynda Herbert-Cheshire (2000) yang menjelaskan, strategi kontemporer untuk pembangunan pedesaan di Australia didasarkan pada gagasan swadaya dan prakarsa berbasis komunitas dari bawah ke atas yang dikatakan memberdayakan individu dari struktur intervensi pemerintah yang memaksakan. Sementara strategi seperti

⁴⁰ Barraket. Et al. 2019. *Resourcefulness of locally-oriented social enterprises: Implications for rural community development*. Journal of Rural Studies.

⁴¹ Eswarappa Kasi. 2013. *Role of Women in Sericulture and Community Development: A Study from a South Indian Village*. SAGE Open.

itu tidak sepenuhnya baru di Australia, tampaknya, sampai saat ini belum cukup diteorikan dan umumnya dianggap, dalam istilah yang agak fungsionalis, sebagai indikasi upaya untuk mengurangi pengeluaran publik.⁴²

12. Penelitian yang berjudul *Participatory landscape planning and sustainable community development: Methodological observations from a case study in rural Mexico* oleh Valencia-Sandoval, Flanders, dan Kozak (2010) yang menjelaskan, keterlibatan masyarakat melalui penggunaan perencanaan lanskap partisipatif adalah cara yang efektif untuk menginformasikan dan mempengaruhi kebijakan lokal terkait dengan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan di pedesaan Meksiko. Selain itu, hal ini menunjukkan kurangnya perencanaan di lanskap di luar pusat populasi utama, dan utilitas terbatas dari kebijakan yang ada yang tidak memiliki skala dan penerapan yang sesuai untuk daerah pedesaan.⁴³
13. Penelitian yang berjudul *Do community empowerment and enabling state policies work in practice? Insights from a community development intervention in rural Scotland* oleh Markantoni, Steiner, Meador, dan Farmer (2018) yang menjelaskan, beberapa komunitas lebih sulit untuk diaktifkan dan memerlukan dukungan negara eksternal yang memenuhi kebutuhan lokal sehingga komunitas ini memainkan peran sipil yang lebih aktif. Jika negara mencari 'komunitas tangguh', intervensi harus dirancang bersama dengan warga untuk menciptakan kondisi yang akan melibatkan dan memungkinkan orang untuk mengambil kendali lebih besar atas

⁴² Lynda Herbert-Cheshire. 2000. *Contemporary strategies for rural community development in Australia: a governmentality perspective*. Journal of Rural Studies.

⁴³ Valencia-Sandoval. Et al. 2010. *Participatory landscape planning and sustainable community development: Methodological observations from a case study in rural Mexico*. Landscape and Urban Planning.

aspek masa depan mereka, termasuk komunitas dengan sejarah partisipasi sipil yang minimal.⁴⁴

14. Penelitian yang berjudul *Alaska's community development quota program: A complex institution affecting rural communities in disparate ways* oleh Lyons, Carothers, dan Coleman (2019) yang menjelaskan, di beberapa komunitas, program kuota pengembangan masyarakat meningkatkan otonomi lokal dan, kesejahteraan. Di komunitas lain, warga merasa kehilangan haknya; kontrol atas sumber daya mereka berada di ruang dewan kota tempat mereka berjuang untuk mendapatkan akses. Dinamika kekuatan yang dibangun ke dalam desain program kuota pengembangan masyarakat memiliki konsekuensi penting bagi kesejahteraan masyarakat dan bahwa program pembangunan masa depan dalam pengelolaan perikanan bisa mendapatkan manfaat pada pemahaman yang terlebih baik mengenai konsep sosial budaya seperti kesejahteraan, baik dalam desain program dan tahapan penilaian.⁴⁵
15. Penelitian yang berjudul *A Stakeholder Approach to Community Participation in a Rural Development Project* oleh Usadolo dan Caldwell (2016) yang menjelaskan, proyek masyarakat pedesaan (Nguni Cattle Project) yang menggunakan Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai alat untuk fokus operasionalnya. Analisis data mengungkapkan promosi saling pengertian melalui hubungan kolaboratif yang berkelanjutan diantara para pemangku keperluan. Studi ini memaparkan perspektif yang baru dalam literatur dan praktik pembangunan pedesaan karena fokusnya pada jenis partisipasi pemangku kepentingan dalam proyek pembangunan pedesaan.⁴⁶

⁴⁴ Marianna Maekantoni. Et al. 2018. *Do community empowerment and enabling state policies work in practice? Insights from a community development intervention in rural Scotland*. Geoforum.

⁴⁵ Courtney Lyons. Et al. 2019. *Alaska's community development quota program: A complex institution affecting rural communities in disparate ways*. Marine Policy.

⁴⁶ Sam E Usadolo, dan Marc Caldwell. 2016. *A Stakeholder Approach to Community Participation in a Rural Development Project*. SAGE Open.

Tabel I.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Helle Norgaard, dan Annette Aagaard Thuesen (2021)	Rural community development through competitions, prizes, and campaigns: The villagers' perspective	Menganalisis apakah kriteria dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengamankan pendanaan atau memenangkan hadiah sesuai dengan pemahaman teoritis dan rekomendasi untuk pengembangan masyarakat pedesaan.	Kompetisi, hadiah, dan kampanye dapat dianggap sebagai penggerak pengembangan masyarakat pedesaan.
2.	Arum Winarsih (2019)	Pengembangan Pariwisata dilihat dari Prespektif <i>Community Development</i> (Studi pada Kampung Nelayan Warna-Warni Kenjeran Kota Surabaya)	Mengupayakan pengembangan pariwisata serta menangani situasi lingkungan kumuh yang dijalankan dari pemkot Surabaya yang tujuannya memberikan peningkatan kapasitas serta kesejahteraan penduduk.	Pengembangan pariwisata dikampung nelayan warna-warni Kenjeran di pemkot Surabaya yang di tinjau dengan pemikiran <i>community development</i> belumlah maksimal implementasinya.
3.	Jashinta Silvia (2019)	Analisis Prinsip <i>Community Development</i> pada Program Pengendalian <i>Tuberculosis</i> (Studi Kasus pada Inovasi Program Gerakan Masyarakat Berantas TB (Gemar Bertasbi) Di	Penerapan prinsip <i>community development</i> pada program Gemar Bertasbi (Gerakan Masyarakat Berantas TB) di Puskesmas Bangsal Kabupaten Mojokerto.	Pelaksanaan program Gemar Bertasbi (Gerakan Masyarakat Berantas TB) di Kecamatan Bangsal sudah menerapkan prinsip-prinsip <i>community development</i> .

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
		Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)		
4.	Barraket, Eversole, Luke, dan Barth (2019)	Resourcefulness of locally- oriented social enterprises: Implications for rural community development	Praktik sumber daya dari usaha sosial kecil dan menengah pedesaan dan perkotaan dan pengaruhnya terhadap pengembangan masyarakat.	Sumber daya organisasi diperluas ke fokus pada sumber daya komunitas oleh perusahaan sosial, bermain dengan cara yang berbeda dalam konteks pedesaan dan perkotaan.
5.	Lyons, Carothers, dan Coleman (2019)	Alaska's community development quota program: A complex institution affecting rural communities in disparate ways	Bagaimana program kuota pengembangan masyarakat telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat	Dinamika kekuatan yang dibangun ke dalam desain program kuota pengembangan masyarakat memiliki konsekuensi penting bagi kesejahteraan masyarakat dan bahwa program pembangunan masa depan dalam pengelolaan perikanan bisa mendapatkan manfaat pada pemahaman yang lebih baik mengenai konsep sosial budaya misalnya kesejahteraan, baik didalam desain program dan tahapan penilaian.
6.	Alison Rogers (2018)	Demonstrating the Value of Community Development: An Inclusive Evaluation Capacity Building Approach in a Non-Profit Aboriginal	Bagaimana melawan masyarakat adat mengembangkan kapasitas evaluasi dalam cara yang inklusif dan sesuai secara budaya dan hasil penilaian independen dari nilai proses.	Pengembangan masyarakat sudah berjalan efektif dalam pelaksanaan programnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
		and Torres Strait Islander Organisation		
7.	Markantoni, Steiner, Meador, dan Farmer (2018)	Do community empowerment and enabling state policies work in practice? Insights from a community development intervention in rural Scotland	Apakah intervensi dan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dapat mengarah pada kondisi yang memungkinkan.	Beberapa komunitas lebih sulit untuk diaktifkan dan memerlukan dukungan negara eksternal yang memenuhi kebutuhan lokal sehingga komunitas ini memainkan peran sipil yang lebih aktif
8.	Susie Sykes, Jane Wills dan Keith Popple (2017)	The Role of Community Development in Building Critical Health Literacy	Membahas hubungan antara literasi kesehatan kritis dan pengembangan masyarakat	Proyek membangun kesehatan kritis belum berjalan
9.	Parhad Keyim (2017)	Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonistahti	Sebuah daerah pinggiran di kotamadya Lieksa, Finlandia, artikel ini membongkai sebuah pendekatan tata kelola kolaboratif pariwisata masyarakat.	pengembangan masyarakat melalui pariwisata dengan sistem kolaborasi pemerintah di Finland mengalami kegagalan
10.	I Wayan Edi Arsawan, Ni Made Kariati, dan I Wayan Sukarta (2016)	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Community Development (Studi Eksploratif di Kawasan Wisata Sangeh)	Menggali dengan cara eksploratif pola pemberdayaan penduduk dikawasan wisata Sangeh melewati pengembangan serta keterlibatan penduduk	Konsep pemberdayaan masyarakat yang diterapkan adalah pemberdayaan berbasis teknikal profesional yaitu pola pemberdayaan partisipatif melalui peningkatan peran agen – agen pembaharuan yang dibuktikan dengan peran serta yang menonjol dari kalangan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
				generasi muda dan berkolaborasi dengan tokoh adat.
11.	Simon J V Silaen (2016)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Community Development</i> dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan	Penerapan prinsip-prinsip community development dalam pelaksanaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di kecamatan Medan Helvetia.	Peningkatan kesejahteraan keluarga peserta program usaha peningkatan pendapatan keluarga berencana yang dimana dengan diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> dalam program tersebut sangat membantu mereka dalam mencapai tujuan.
12.	Usadolo dan Caldwell (2016)	A Stakeholder Approach to Community Participation in a Rural Development Project	Mengidentifikasi bagaimana para pemangku kepentingan mencerminkan tujuan Participatory Rural Appraisal proyek.	Promosi saling pengertian melalui hubungan kolaboratif yang berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan.
13.	Eswarappa Kasi (2013)	Role of Women in Sericulture and Community Development: A Study from a South Indian Village	Peran perempuan dalam mempromosikan kegiatan serikultur di desa, dan bagaimana partisipasi mereka telah mengarah pada pengembangan masyarakat.	Perempuan memainkan peran penting dalam kegiatan pemeliharaan dan pengolahan sutra.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
14.	Valencia-Sandoval, dan Flanders, dan Kozak (2010)	Participatory landscape planning and sustainable community development: Methodological observations from a case study in rural Mexico	Keterlibatan masyarakat melalui penggunaan perencanaan lanskap partisipatif	Kurangnya perencanaan di lanskap di luar pusat populasi utama, dan utilitas terbatas dari kebijakan yang ada yang tidak memiliki skala dan penerapan yang sesuai untuk daerah pedesaan.
15.	Lynda Herbert-Cheshire (2000)	Contemporary strategies for rural community development in Australia: a governmentality perspective	Mengeksplorasi wacana pemerintah dan pakar tentang pengembangan masyarakat pedesaan di Queensland dan menyarankan, bahwa strategi-strategi ini menunjukkan bentuk pemerintahan liberal maju yang berusaha & memerintah melalui komunitas.	Pemberdayaan dari self-help sering disebut sebagai kebijakan terbesarnya, itu tidak begitu banyak kontrol sebagai beban tambahan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada masyarakat setempat.

Sumber: berbagai jurnal publikasi *online* dan situs *website* (diolah)

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa penelitian yang saya lakukan memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arum Winarsih yaitu dengan tujuan untuk mendiskripsikan penerapan prinsip-prinsip *community development* dalam pengembangan pariwisata serta menangani situasi lingkungan kumuh yang dijalankan dari Pemerintah Kota Surabaya yang tujuannya memberikan peningkatan kapasiatas serta kesejahteraan penduduk; dan penelitian yang ditulis oleh Jashinta Silvia yaitu Penerapan prinsip *community development* pada program Gemar Bertasbi (Gerakan Masyarakat Berantas TB) di Puskesmas Bangsal Kabupaten Mojokerto; selanjutnya penelitian oleh Simon J V Silaen dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip *Community Development* dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan; serta penelitian oleh Helle Norgaard, dan Annette Aagaard Thuesen yang berjudul *Rural community development through competitions, prizes, and campaigns: The villagers' perspective*. Adapun persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai topik prinsip-prinsip *community development*. Namun, diantara kesamaan tersebut juga terdapat perbedaaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu mendiskripsikan mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dilihat dari prinsip-prinsip *community development*. oleh karena itu, judul penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat Desa dilihat dari Perspektif *Community Development*: Studi Pada Badan Usaha Milik Desa “Lestari” Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti rumuskan permasalahan penelitian adalah bagaimana proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa “Lestari” untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dilihat dari Perspektif *Community Development*?

I.3 Tujuan Penelitian

Bersumber latar belakang serta rumusan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, secara umum kajian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa “Lestari” untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dilihat dari Perspektif *Community Development*.

I.4 Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat baik dengan cara akademis ataupun praktis. Ada pun manfaat yang diharapkan dari kajian ini yakni sebagai berikut:

I.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa “Lestari” untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dilihat dari Perspektif *Community Development*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan rujukan bagi penelitian yang sejenis di masa pendatang, sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap ilmu pengetahuan ilmiah bagi perkembangan kajian Administrasi Publik.

I.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi menyeluruh serta menjadi rujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Disisi lain, penelitian ini juga dapat memberikan rujukan serta masukan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam menerapkan dan melaksanakan program yang serupa.

I.5 Tinjauan Pustaka

I.5.1 *Community Development*

I.5.1.1 Latar Belakang Munculnya *Community Development*

Awal munculnya konsep *community development* atau pengembangan masyarakat di Amerika Serikat yang mulanya berkembang secara akademis baik ditingkat desa ataupun ditingkat kota. Ditingkat desa, konsep *community development* atau pengembangan penduduk memiliki sumber dibidang Pendidikan utamanya perluasan Pendidikan ditingkat desa (*rural extension program*). Sedangkan di tingkat kota konsep *community development* atau pengembangan masyarakat terkait dengan pengembangan organisasi komunitas (*community organization*) dengan sumber yang diambil pada bidang kesejahteraan sosial ditahun 1873 (Brokensha serta Hodge, 1969, didalam Adi, 2001).⁴⁷ Di Amerika Serikat perkembangan *community development* atau pengembangan masyarakat lebih cenderung pada situasi penduduk didalam kondisi perang. Pada akhir Perang Dunia II, penduduk bergeser dari aktivitas masa perang ke kegiatan masa damai dan didorong untuk menjadi bentuk gerakan sosial (Sanders, 1958).

Perkembangan konsep *community development* atau pengembangan masyarakat di Inggris dengan cara akademis tidaklah beda dengan perkembangan di Amerika Serikat hanya saja di Inggris memiliki banyak kaitan dengan aktivitas komunitas di area koloni.⁴⁸ Pada tahun 1948 istilah *community development* atau pengembangan masyarakat dengan cara resmi di Inggris agar dapat menggantikan istilah lamanya *mass education* (pendidikan masal). Pemerintah Inggris pada saat itu mendefinisikan pengembangan masyarakat atau *community development* sebagai gerakan yang bertujuan agar dapat memberikan peningkatan kehidupan semua komunitas melalui partisipasi aktif serta atas inisiatif komunitasnya.⁴⁹ Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya konsep pengembangan masyarakat atau *community development* tersebut adalah perkembangan pengetahuan tentang struktur dan proses sosial yang diperoleh sejak Perang Dunia I, dan banyak orang

⁴⁷ Fredian Nasdian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal 25.

⁴⁸ *Ibid.* hal 27.

⁴⁹ *Ibid.* hal 27.

mulai terlibat didalam tindakan sosial serta memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada.⁵⁰

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *community development* atau pengembangan masyarakat bisa diartikan berbagai definisi dalam rangka membantu mengatasi masalah isu-isu penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan komunitas oleh pemerintah dan pihak lain secara efektif.

I.5.1.2 Pengertian Community Development

Pengembangan penduduk atau *community development* ialah teori dasar yang menyoroti beberapa istilahnya yang dipakai dalam jangka panjang misalnya pengembangan sumber daya masyarakat, pengembangan kawasan pedesaan, pengembangan ekonomi masyarakat, revitalisasi pedesaan dan pengembangan berbasis masyarakat. Arti penting dari *community development* atau pengembangan masyarakat yang sebenarnya adalah untuk menggambarkan arti penting dari dua konsep, *community* dan *development*. *community* mengacu pada kualitas hubungan sosial serta *development*, menuju perubahan yang terencana serta bertahap. (Blackburn, 1989).⁵¹

Sebelum masuk ke pengertian *community development* atau pengembangan masyarakat, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian pengembangan dan pengertian masyarakat atau kelompok. Pengembangan adalah program yang ditujukan agar dapat memberikan peningkatan kualitas hidup seseorang, meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta sosial budaya.⁵² Menurut Christensen dan Robinson, komunitas adalah sekelompok orang yang dapat diidentifikasi yang berbagi wilayah yang sama, di mana mereka memiliki kesamaan yang menyatukan mereka untuk bertindak. Komunitas ini mencakup komunitas mikro (kelompok minat khusus, kota kecil, komunitas, komunitas, desa, dll.) dan komunitas makro

⁵⁰ *Ibid.* hal 26.

⁵¹ *Ibid.* hal 30.

⁵² Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama. hal 39.

(kota besar, kota besar, wilayah, negara bagian, bangsa, aliansi bangsa, dan kemanusiaan global).⁵³

Mattarita-Cascante serta Brennan berpendapat bahwa komunitas merupakan sebuah lokasi yang didalamnya terdapat individu-individu yang tinggal di wilayah geografis tersebut; sumber daya yang diperlukan seseorang tersebut agar dapat bertahan hidup serta berkembang; dan proses dimana orang-orang tersebut terlibat untuk mendistribusikan dan bertukar sumber daya itu agar dapat memenuhi keperluan serta keperluan lokal.⁵⁴ Mattesich serta Monsey, komunitasnya di sisi lain, mengacu pada seseorang yang tinggal di wilayah geografis khusus serta yang mempunyai ikatan sosial serta psikologis 1 sama lainnya serta dengan lokasi di mana mereka tinggal.⁵⁵

Dari bermacam pengertian komunitas diatas, bisa di simpulkan bahwasannya komunitas ialah sekelompok orang yang bertempat tinggal di sebuah wilayah geografis khusus serta mempunyai kepentingan yang sama, memiliki hubungan sosial dan psikologis yang lebih besar dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam penelitian ini, komunitas yang dimaksud adalah mitra atau anggota dari BUMDes Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang terlibat dalam program kerja yang dilaksanakan oleh BUMDes Lestari Desa Karangsono Kec.Kanigoro Kab.Blitar.

Konsep *community development* ataupun pengembangan penduduk menjelaskan bahwa teori tersebut dipakai agar dapat memberikan dorongan partisipasi aktif penduduk didalam proses pembangunan. Perihal senada diungkapkan oleh Pitchford serta Henderson yang mengartikan *community development* atau pengembangan masyarakat sebagai pengupayaan memberikan bantuan kelompok penduduk mempunyai suara serta pengaruhnya pada desas-

⁵³ Bhattacharya, Jnanbrata. 2004. *Theorizing of Community Development*. USA: Southern Illinois University. Hlm 11.

⁵⁴ Green J John. 2016. *Community Development and Social Development : Informing Concepts of Place and Internationals Social Change in a Globalizing World*. USA: Sage Publicatoins. hlm 606.

⁵⁵ Phillips, and Robert H.Pittman. 2009. *An Introduction To Community Development*. USA : Taylor an Francis e-library. hal.6.

desus yang relevan dengan hidupnya mereka maka hal-hal yang jadi keperluan mereka lebih tertata.⁵⁶

Konsep *community development* atau pengembangan masyarakat sebagai proses kepada setiap orang untuk memutuskan apa yang dia perlukan serta apa yang mampu dia lakukan. *Community development* atau pengembangan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan manusia yang nantinya hasil dari pemberdayaan tersebut bisa dikembangkan dalam jangka panjang, agar masyarakat tidak menggantungkan orang lain.

Dalam konsep *community development* atau pengembangan masyarakat diyakini bahwa masyarakat tidak bisa dibantu oleh orang lain tetapi kemauan mereka sendirilah yang nantinya bisa untuk terlibat dalam proses pengembangan tersebut. *Community development* atau pengembangan masyarakat bukan hanya soal bagaimana masyarakat menyelesaikan suatu masalah, tetapi juga seberapa tanggap lembaga-lembaga utama dalam menangani permasalahan terakut kebutuhan masyarakat.⁵⁷ *Community development* atau pengembangan masyarakat memungkinkan warga dan lembaga-lembaga publik menciptakan partisipasi dan kolaborasi antara masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah, partisipasi dan kolaborasi tersebut untuk menciptakan secara positif proses perubahan yang cepat. Hal tersebut akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola urusan anggotanya sendiri dalam mengelola dana yang disediakan oleh pemerintahan pusat untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

Dalam Mattessich dan Monsey, Ploch mendefinisikan *community development* atau pengembangan masyarakat sebagai proses untuk mencapai peningkatan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, dimana tindakan seperti itu mengarah ke penguatan pola masyarakat manusia dan hubungan kelembagaan.⁵⁹

Jim Ife mendefinisikan *community development* atau Pengembangan masyarakat adalah upaya untuk menyediakan masyarakat dengan kesempatan,

⁵⁶ Michael Pitchford and Handerson. 2008. *Making Space for Community Development*

⁵⁷ Phillips, and Robert H. Pittman. 2009. *An Introduction To Community Development*. USA : Taylor and Francis e-library. hal.6.

⁵⁸ *Ibid.* hal.6.

⁵⁹ *Ibid.* hal.6.

pengetahuan, sumber daya, keahlian supaya memberikan peningkatan keterampilan mereka didalam pengambilan keputusan serta partisipasi didalam kegiatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat di masa depan.⁶⁰ Rhonda Phillips dan Pittman juga menjelaskan bahwa *community development* atau pengembangan penduduk ialah proses dimana sekelompok orang bekerja pada pegawai pemerintah serta pemangku keperluan lain untuk memberikan peningkatan situasi sosial ekonomi serta budaya anggota penduduk setempat.⁶¹

Christensen dan Robinson memandang *community development* atau pengembangan masyarakat sebagai pengembangan komunitas dimana sekelompok seorang bekerjasama didalam tatanan penduduk dalam keputusan bersama yang nantinya akan menjadi pemrosesan perubahan dalam situasi ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan mereka.⁶² Frank dan Smith mendefinisikan pengembangan penduduk atau *community development* sebagai sebuah perubahan terencana yang akan mentransformasi tiap aspek kehidupan warga setempat, yaitu perekonomian, sosial, lingkungan serta pembudayaan. Selanjutnya, pengembangan penduduk atau *community development* adalah proses dimana penduduk mengambil tindakan bersama dan mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi bersama.⁶³

Pada tahun 1960, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengartikan pengembangan masyarakat atau *community development* selaku proses aksi sosial kelompok masyarakat, dengan fokus pada pembangunan regional di negara berkembang, pelaksanaan aksi sosial ini dimulai dari usaha rakyat dan otoritas pemerintah, dan selanjutnya akan meningkatkan ekonomi, kondisi sosial dan budaya masyarakat yang memungkinkan rakyat berintegrasi kedalam kehidupan negara, serta masyarakat bisa berkontribusi lebih untuk memajukan negara.⁶⁴

⁶⁰ Suharti, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama. hal 42-44.

⁶¹ Phillips, and Robert H. Pittman. 2009. *An Introduction To Community Development*. USA : Taylor an Francis e-library. hal.7.

⁶² Jerry W Robinson dan Gary Paul Green. 2011. *Intoduction to Community Development: Theory, Practice, and Service-Learning*. SAGE Publication Inc. USA

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ Fredian Nasdian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal 31.

Berdasarkan pengertian diatas, konsep terkait *community development* atau pengembangan masyarakat menunjukkan bahwa *community development* atau pengembangan masyarakat harus dianggap sebagai proses dan hasil. *Community development* atau pengembangan masyarakat dianggap selaku sebuah proses dengan arti untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan suatu kelompok atau individu untuk beritndak secara bersama, sehingga nantinya komunitas atau individu tersebut bisa mengambil keputusan bersama dan hasil dari tindakan tersebut nantinya akan menjadikan perbaikan dalam komunitas atau individu tersebut dalam setiap sektor antara lain sektor fisik, lingkungan, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat atau *community development* adalah suatu rancangan yang mengupas mengenai tahapan peningkatan seluruh bagian aktivitas masyarakat melalui penciptaan masyarakat yang mandiri serta memperkuat ikatan kelembagaan. Rancangan pengembangan masyarakat atau *community development* dapat dipakai dalam mengetahui tahapan kemandirian masyarakat pada sebuah rencana pembangunan. Oleh karena itu pada penelitian ini, konsep *community development* atau pengembangan masyarakat kemudian digunakan guna mengkaji proses pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian masyarakat yang nantinya meningkatkan kualitas hidupnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

I.5.1.3 Tujuan Community Development

Tujuan dari *community development* atau pengembangan masyarakat adalah untuk memastikan pendampingan masyarakat yang dimana nantinya dapat menghasilkan masyarakat yang berdaya. Berdaya yang dimaksud adalah dimana kelompok masyarakat atau komunitas yang mempunyai kapasitas dan otoritas yang memadai untuk mengambil keputusan. Salah satu kegiatan dalam proses pendampingan masyarakat adalah pemberdayaan, dimana pendampingan akan membantu suatu kelompok masyarakat atau komunitas memperoleh kemampuan dan daya untuk memilih mana yang terbaik bagi mereka. Pendelegasian pada

dasarnya mengacu pada kekuatan politik, yaitu kekuatan pengambilan keputusan.⁶⁵ Makna dari pemberdayaan itu sendiri adalah “membantu” kelompok masyarakat atau komunitas dengan sumber daya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan supaya nantinya kelompok masyarakat atau komunitas tersebut mempunyai kapasitas. Oleh karena itu, masyarakat atau komunitas dapat berkontribusi dalam penentuan masa depan kelompok masyarakat atau komunitas tersebut.⁶⁶

Dalam kajian ilmu administrasi negara *community development* atau pengembangan masyarakat berkaitan erat dengan konsep pembangunan. Hal tersebut sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Henderson bahwa kegiatan *community development* atau pengembangan masyarakat dilaksanakan dan diawali oleh organisasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.⁶⁷ Menurut Batten pada tahun 1974 menganggap bahwa *community development* atau pengembangan masyarakat mencari dua perubahan yang dapat memperbaiki kondisi kelompok masyarakat atau komunitas: 1) perbaikan lingkungan dengan menyediakan layanan vital di tingkat lokal, regional dan nasional, seperti membangun klinik untuk layanan kesehatan dan sekolah untuk menyediakan layanan pendidikan, dan 2) bagi Manusia melakukan perubahan yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan yang nantinya dapat memperbaiki keadaannya sendiri, misalnya dengan meningkatkan kemampuan mengorganisir masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya.⁶⁸

I.5.1.4 Prinsip-prinsip Community Development

I.5.1.4.1 Latopa dan Saidu (2015)

Pengembangan masyarakat atau *community development* sebagai proses transformasi dari kesejahteraan masyarakat yang memiliki standar mutlak. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat merupakan bagian dari kerangka kerja dan pedoman dalam pengembangan masyarakat, dimana pengembangan masyarakat akan memfokuskan program kegiatannya agar nantinya saling menggantungkan

⁶⁵ Tacconi dan Tisdell, 1993 dalam Swanepoel dan Beer. 2006.

⁶⁶ Fredian Nasdian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal 51.

⁶⁷ Pitchford dan Henderson. 2008.

⁶⁸ Batten, T.R. 1974. *The Major Issues and Future Direction of Community Development*. Community Development Journal, 9(2): 96-103.

diri demi keperluan bersama. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat ini penting untuk diklarifikasi bahwa, prinsip-prinsip pengembangan masyarakat ini sudah dipraktikan oleh berbagai profesional dan kelompok individu.⁶⁹ Oleh karena itu, berikut merupakan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat untuk kegiatan atau program pengembangan masyarakat yang ideal;

1. Berorientasi pada orang

Bahwa rencana pengembangan masyarakat harus berorientasi pada masyarakat. Program pengembangan masyarakat ini harus menjadi program yang diprakarsai oleh masyarakat bukan program yang dipaksakan untuk mereka. Dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat ini harus melibatkan semua aspek atau komponen pembangunan seperti sosial, budaya, dan ekonomi.

2. Kerangka kerja

Dalam program pengembangan masyarakat ini harus ada struktur kegiatan. Struktur tersebut harus cukup jelas untuk mencakup semua pemangku kepentingan, jadwal kerja, kegiatan langkah demi langkah, peran pemangku kepentingan, dan sumber pendanaan dan harus fleksibel untuk mengakomodasi keadaan lain.

3. Mobilisasi

Mobilisasi masyarakat ini sebagai faktor kunci dalam pengembangan masyarakat yang sehat, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat. Pembangunan keberlanjutan dan proses pembangunan bertujuan untuk mencari pengambilan keputusan yang diperluas. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan para pemangku kepentingan akan menyatukan sumber daya mereka untuk bertujuan tidak hanya mencapai pembangunan tetapi juga untuk mempertahankannya. Dengan demikian perkembangan akan berlangsung lama dan akan berkembang biak secara bertahap.

4. Partisipasi

⁶⁹ Latopa dan Saidu. 2015. Analysis of values and principles of community development: a response to the challenges of building a new Nigeria.

Partisipasi sebagai bagian pusat lain dari pengembangan masyarakat yang menitik beratkan terhadap partisipasi seluruh disiplin pembangunan, baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan, pemantauan, dan pelaksanaan. Dalam partisipasi ini juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui jejaring, selain itu partisipasi juga akan mendorong peningkatan kapasitas dan rasa memiliki.

5. Pemberdayaan

Program pengembangan masyarakat harus menjadi alat untuk memberdayakan semua lapisan masyarakat. Pemberdayaan ini dapat dicapai melalui pendidikan dan pelibatan masyarakat. Saat individu tak mampu, artinya mereka berada dalam kemiskinan, pendapatan yang sedikit, terlantar, tanpa pelayanan sosial yang nyata, kekurangan, sakit dan sehat, orang-orang seperti itu hendak menghadapi depresi psikologis. Dengan demikian, melakukan pemberdayaan masyarakat memiliki arti meningkatkan harkat dan martabat kelas sosial yang tidak bisa lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan.

6. Kemitraan

Kemitraan merupakan tren baru dalam pengembangan masyarakat yang mengakomodir seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kemitraan ini berarti berbagi asset dengan timbal balik. Oleh karena itu, asset dapat dikumpulkan menjadi satu guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Pemangku kepentingan ini ikut kedalam pemerintah maupun lembaga mereka, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mitra pembangunan yang lain.

7. Motivasi

Motivasi didalam pengembangan masyarakat merupakan fitur psikologis yang membangkitkan organisme untuk bertindak menuju tujuan tertentu. Motivasi bisa disebut kekuatan pendorong, dengan adanya motivasi dorongan psikologis yang memaksa atau memperkuat suatu tindakan menuju tujuan yang diinginkan. Motivasi

yang termasuk pengembangan masyarakat ditonjolkan pada aktivitas yang dapat memberikan masyarakat daya untuk menjadi sukarelawan atau didorong untuk bekerja menuju tujuan pembangunan. Kegiatan motivasi ini termasuk pengakuan dan perayaan kesuksesan, penghargaan atas usaha, konseling, kepemilikan dan kepemilikan, dan banyak lagi.

8. Keberlanjutan

Secara global, Persatuan Bangsa Bangsa juga telah mengubah strategi pembangunannya, tidak hanya menuju pembangunan, tetapi menuju pembangunan berkelanjutan. Ini menekankan keperluan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat. Bersama fokus ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada tahapan pembangunan serta mengangkat strategi dengan berfokus pada masyarakat guna menjaga terlaksananya pembangunan berkepanjangan.

9. Keadilan sosial

Keadilan sosial ini merupakan aspek yang mengerikan dari keterbelakangan. Keadilan sosial merupakan faktor yang menempatkan satu sisi yang menguntungkan dari suatu komunitas atau masyarakat di atas atau di atas yang lain. Ketika situasi seperti ini terjadi di masyarakat mana pun, akan ada penindasan, perampasan, pengabaian, dan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, pengembangan masyarakat perlu dilakukan sedemikian rupa guna memastikan pemerataan hak, distribusi kekayaan, akses ke layanan penting dan partisipasi yang setara. Keadilan sosial juga mencakup hak individu atau kelompok untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa merasa takut dianiaya atau menjadi korban.

10. Pelaku etis

Pengembangan masyarakat adalah pengejaran akademis dan pekerjaan profesional, oleh karena itu kode etik dan perilaku harus diterapkan dalam segala fungsinya. Penerapannya akan memberikan

kredibilitas pada seluruh proses jika terjadi ketidaksepakatan atau advokasi.

I.5.1.4.2 Jim Ife (1995)

Prinsip dasar pengembangan masyarakat atau *community development* telah lahir pada beragam diskusi. Secara nyata, penerapan pengembangan masyarakat ada bermacam-macam antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat ini sangatlah penting dalam penerapannya sehingga perlu diterapkan secara maksimal. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya.⁷⁰ Jim Ife memaparkan 22 prinsip pengembangan masyarakat atau *community development* seperti berikut ini;

1. Pembangunan Terpadu

Sistem pengembangan masyarakat beroperasi sebagai satu kesatuan dan sistem pembangunan meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan pribadi. Keenam aspek ini sangat penting dan saling terkait, jika hanya satu aspek yang ditekankan dalam proses pembangunan masyarakat, maka akan menimbulkan pembangunan yang tidak seimbang.

2. Konfrontasi dengan Kebatilan Struktural

Prinsip ini berakar pada sudut pandang keadilan sosial pada pembangunan masyarakat. Pekerja masyarakat harus menyadari betapa kompleksnya tekanan pada kelas, gender, dan kelompok etnis. Pekerja komunitas harus lebih kritis terhadap konteks komunitas, ras, gender, sikap berbasis kelas, dan keterlibatan komunitas-ke-komunitas. Oleh karena itu, masyarakat pekerja harus tetap waspada dan mempertimbangkan kompleksitas yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, pekerjaan seorang pekerja komunitas bergantung pada beraneka macam faktor kontekstual.

3. Hak Asasi Manusia

⁷⁰ Fredian Nasdian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal 49.

Bagi pekerja komunitas Hak Asasi Manusia paling penting agar susunan masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, pelaksanaan rencana pembangunan masyarakat perlu berpedoman pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, antara lain hak atas penghidupan yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak atas perlindungan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

4. Keberlanjutan

Keberlanjutan dalam program pengembangan masyarakat bertujuan dalam pengurangan ketergantungan pada sumber daya yang tak terbarukan serta melahirkan alternatif dan pengaturan ekologi, sosial, ekonomi dan politik yang berkepanjangan ditingkat lokal. Dalam prinsip pemberdayaan tersebut, dibutuhkan penggunaan setidaknya sumber daya tak terbarukan, yang relevan bagi masyarakat lokal pada perihal pemakaian lahan, cara hidup, konservasi, transportasi, dan banyak lagi. Saat melaksanakan program pengembangan masyarakat, berusaha untuk membatasi ketergantungan terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan diganti dengan sumber daya terbarukan.

5. Pemberdayaan

Setiap program pengembangan masyarakat wajib memiliki tujuan pemberdayaan. Pemberdayaan itu sendiri yang berkaitan tentang menolong masyarakat mendapatkan akses ke sumber daya, peluang, keterampilan, dan pengetahuan yang memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan anggota masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, tidak cukup berasumsi bahwa masyarakat dapat mandiri. Hal-hal tersebut berguna untuk kekuatan, akan tetapi masih belum cukup.

6. Pribadi dan Politik

Pengembangan masyarakat perlu ada kebutuhan untuk menarik hubungan antara aspek pribadi dan politik, masalah pribadi dan

struktural, pribadi dan publik. Jika kebutuhan individu, masalah, keinginan, rasa sakit, dan pencapaian yang dianggap bisa dibangun di masyarakat dalam bentuk perbuatan yang efektif, maka koneksi terjalin dan kemudian menjadi komunitas kekuatan.

7. Kepemilikan Komunitas

Kepemilikan ini merupakan komponen krusial yang mendukung proses lahirnya identitas dan menyampaikan dasar pemikiran guna terciptanya partisipasi aktif dalam program pengembangan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya di kalangan masyarakat. Kepemilikan ini bisa dibagi menjadi dua tingkat, kepemilikan objek fisik, dan kepemilikan proses dan struktur yang ada.

8. Kemandirian

Prinsip kemandirian ini dirancang untuk memungkinkan anggota masyarakat menelusuri maupun mencoba penggunaan sumber daya yang mereka miliki bila hal tersebut mungkin terjadi, daripada mengandalkan pertolongan eksternal. Hal ini menargetkan semua bentuk sumber daya, termasuk keuangan, teknologi, sumber daya alam dan manusia. Prinsip kemandirian ini adalah kunci dalam mewujudkan sistem pembangunan berkelanjutan dengan mencoba mengaplikasikan penggunaan kapasitas lokal untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya.

9. Ketidaktergantungan pada Pemerintah

Prinsip ini memiliki kaitan terhadap kemandirian masyarakat. Pekerja masyarakat serta anggota masyarakat harus memberi pertimbangan lebih saat akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Akan tetapi, hal ini tidak dapat diartikan sebagai tidak menerima bantuan pemerintah, yang terkadang penting untuk mengawali tahapan pembangunan. Pada keadaan ini, pemerintah memiliki peran sebagai sponsor *community development* serta reaksi pemerintah adalah perlunya membangun sokongan pemerintah pada program *community*

development. Dengan demikian, pendekatan *community development* perlu meminimalisir peran pemerintah.

10. Tujuan dan Visi

Tujuan dan visi harus menjadi atensi dalam pendekatan pengembangan masyarakat dan tidak boleh dilihat sebagai dilema yang patut memperoleh atensi yang lebih. Tindakan yang dapat mewujudkan tujuan jangka pendek tidak masuk akal jika tidak sejalan dengan visi berkelanjutan, dan kebalikannya. Pada pembangunan masyarakat, keseimbangan harus dijaga baik tujuan jangka pendek serta visi masyarakat.

11. Pembangunan bersifat Organik

Inti dari prinsip ini adalah bahwa anggota masyarakat perlu menjunjung dan memperhitungkan suatu perbuatan dari anggota masyarakat, memungkinkan dan mendorong mereka untuk berkembang dengan cara mereka sendiri yang unik. Menerapkan pembangunan yang sifatnya organik dengan memahami apabila terdapat ikatan yang rumit diantara anggota masyarakat dengan lingkungannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa komunitas lebih organik dari pada mekanis lantaran gaya mereka beroperasi bertentangan dengan hukum sebab dan akibat. Komunitas itu kompleks dan dinamis. Hal ini berarti, cara mereka berkembang harus menghormati tatanan serta nilai-nilai komunitas, sesuai dengan fluiditas dan ciri khas komunitas secara keseluruhan.

12. Kecepatan Gerak Pembangunan

Prinsip ini melakukan penekanan pada sistem pengembangan membiarkan dirinya bekerja daripada mempercepat. Biasanya perencana akan melakukan percepatan pada sistem pembangunan supaya dapat secara langsung mengetahui hasil yang dikeluarkan. Akan tetapi, hal ini belum sejalan dengan pendekatan *community development*. Kesuksesan pembangunan masyarakat tergantung dari vitalitas masyarakat. Keberhasilan pekerja komunitas tergantung pada

keputusan tentang langkah dan tindakan berdasarkan dinamika proses komunitas. Pada dasarnya, pengembangan masyarakat adalah proses pembelajaran masyarakat jangka panjang.

13. Keahlian Pihak Luar

Keahlian maupun pengalaman seseorang pada suatu daerah dan pengalaman perkembangan dapat dipelajari sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan di bidang lain, tetapi prinsip keahlian pihak luar tidak mengharapkan peniruan mutlak. Pada pendekatan ini harus melakukan perkembangan secara natural beserta langkah yang tepat dengan kondisi tertentu dan peka terhadap budaya, tradisi dan lingkungan masyarakat lokal. Hal ini memiliki arti bahwa sumbangsih pembimbing dari luar masyarakat sangat berharga jika masyarakat siap mengadopsinya sesuai dengan kemampuan dan metodenya. Dengan demikian, komunikasi horizontal (belajar dari orang lain, tidak ditentukan oleh pembimbing) merupakan syarat awal bagi program pengembangan masyarakat. Selain itu, rasa tanggung jawab terhadap masyarakat perlu dikembangkan dari keragaman.

14. Membangun Komunitas

Prinsip ini berlaku baik secara formal maupun informal. Ini mengungkapkan bahwa ini bukan hanya tentang menyatukan orang, tetapi proses yang melibatkan memotivasi individu agar bekerjasama, lebih mengandalkan satu sama lain untuk merampungkan pekerjaan. Prinsip ini mencari cara di mana setiap orang dapat berkontribusi dan dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu, program pengembangan masyarakat meliputi penguatan interaksi sosial di tingkat masyarakat, peningkatan solidaritas, transformasi melalui dialog, pemahaman dan aksi sosial. Pengembangan masyarakat melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan bersama, memecahkan masalah bersama dan meningkatkan interaksi formal dan informal.

15. Proses dan Hasilnya

Pembangunan cenderung hanya berfokus pada apa yang dicapai dan bagaimana cara mencapainya tidak penting. Dalam pengembangan masyarakat, proses dan hasil merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan yang saling mendukung, sehingga keduanya penting. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa anggota masyarakat harus selalu menghubungkan antara proses dan hasil dan sebaliknya. Dengan kata lain, dalam suatu program pengembangan masyarakat, proses dan hasil merupakan satu kesatuan, bukan sebagai fenomena yang terpisah.

16. Keterpaduan Proses

Proses yang digunakan untuk mencapai tujuan harus selaras dengan hasil yang diinginkan, melibatkan keberlanjutan, keadilan sosial, dll. Dalam pengembangan masyarakat, proses sama pentingnya dengan hasil. Proses tersebut berjalan di masyarakat dan membutuhkan akses ke penelitian dan evaluasi agar proses integrasi dapat berlanjut.

17. Tanpa Kekerasan

Prinsip ini berusaha mencari cara untuk memerangi segala bentuk kekerasan atau paksaan yang terang-terangan, seperti paksaan fisik berupa militerisme, hukuman badan, hukuman mati, kebrutalan polisi, dan lain-lain. Pengembangan masyarakat membutuhkan non-kekerasan, tetapi kekerasan di sini tidak didefinisikan semata-mata sebagai kekerasan fisik. Tidak hanya itu, kekerasan juga diartikan sebagai kekerasan struktural. Dengan kata lain, pembangunan masyarakat berlangsung tanpa kekerasan struktural, yaitu tanpa mengubah institusi dan struktur sosial masyarakat yang ada. Pendekatan pengembangan masyarakat berusaha membawa perubahan melalui proses tanpa kekerasan tanpa kekerasan struktural.

18. Inklusif

Penerapan prinsip ini menekankan bahwa anggota masyarakat menghormati orang lain, bahkan jika mereka memiliki pandangan yang berlawanan. Ketika anggota komunitas ingin berubah pikiran

tentang sesuatu, mereka mencoba meyakinkan mereka. Anggota masyarakat harus menyambut mereka dan tidak memperlakukan mereka. Bahkan jika mereka tidak setuju dengan ide-ide, nilai-nilai, dan politik masyarakat, mereka menghargai dan berusaha untuk merangkul mereka daripada mengasingkan mereka. Bekerja di masyarakat pada dasarnya selalu mengundang semua pihak, dan tidak mengecualikan mereka meskipun berbeda pandangan atau pendapat.

19. Konsensus

Prinsip ini lebih dari sekedar setuju untuk menerima kehendak mayoritas. Implementasi lebih lanjut adalah membuat orang-orang yang terlibat dalam proses mencari solusi masalah benar-benar sadar bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik. Pendekatan non-kekerasan dan inklusif terhadap proses pengembangan masyarakat didasarkan pada konsensus, dan jika memungkinkan, proses pengambilan keputusan berbasis konsensus harus diterapkan. Metode konsensus bekerja dengan protokol dengan tujuan menghasilkan solusi yang menjadi milik komunitas. Konsensus harus dibangun dan tidak dapat dicapai dengan mudah dalam waktu singkat.

20. Kerjasama

Program pengembangan masyarakat berusaha untuk bermitra dengan tindakan masyarakat lokal dengan menyatukan orang-orang dan berusaha untuk menghargai perilaku kooperatif. Pada tingkat dasar, pengembangan masyarakat dapat mengarah pada koperasi yang mengundang orang-orang dari acara komunitas untuk bekerja sama menemukan perilaku kooperatif individu atau kelompok. Dengan bekerja sama, kita akan dapat berbagi perasaan dan masalah kita sehingga dalam jangka panjang kita akan dapat menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi bersama di komunitas kita.

21. Partisipasi

Dalam melakukan pengembangan masyarakat, partisipasi harus dimaksimalkan agar setiap orang dalam masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, selalu optimalkan partisipasi dalam melakukan pengembangan masyarakat. Dirancang untuk melibatkan semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan selama fase perencanaan dan implementasi, serta dalam proses implementasi dan evaluasi. Melalui partisipasi anggota masyarakat, proses belajar dari satu sama lain, mereka secara alami dapat mengubah kegiatan tradisional eksklusif menjadi kegiatan partisipatif, dan mengandalkan satu sama lain dalam cara gerakan.

22. Mendefinisikan Kebutuhan

Proses mengidentifikasi kebutuhan merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pekerja masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, pendekatan tersebut harus mengupayakan keselarasan berbagai kebutuhan. Untuk itu, peran yang sangat penting dari pekerja masyarakat adalah untuk mencapai konsensus tentang berbagai kebutuhan anggota masyarakat. Kebutuhan untuk membatasi datang dari anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebutuhan tersebut melalui dialog. Melalui dialog, diharapkan dapat digarap sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan, bukan keinginan, anggota masyarakat. Selain itu, pengembangan masyarakat diharapkan dapat mengartikulasikan persinggungan antara kebutuhan dan tindakan yang harus diambil.

Dari 22 prinsip pengembangan masyarakat, yang terpenting bagi anggota masyarakat adalah mampu menghubungkan prinsip-prinsip tersebut, daripada berpikir di luar struktur dan proses. Mengingat konsep *community development* ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan mencakup seluruh masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa *community development* merupakan alternatif pembangunan berbasis masyarakat yang menyeluruh.

I.5.1.4.3 Green dan Haines (2002)

Dalam pengembangan masyarakat, terdapat prinsip-prinsip yang mengartikulasikan perspektif ekologis dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini saling terkait selama implementasi. Sangat sulit untuk mempraktikkan satu prinsip tanpa mengaitkannya dengan prinsip lainnya.⁷¹ Ada tiga prinsip yang saling berhubungan menurut Green dan Haines, yaitu:

1. Hubungan
2. Komunikasi untuk perubahan
3. Pengambilan keputusan yang rasional

⁷¹ Phillips, and Robert H. Pittman. 2009. *An Introduction To Community Development*. USA : Taylor and Francis e-library. hal 21.

Tabel I.4 Prinsip-Prinsip *Community Development*

Latopa dan Saidu (2015)	Jim Ife (1995)	Green dan Haines (2002)
Partisipasi	Keberlanjutan	Hubungan
Pemberdayaan	Pemberdayaan	Komunikasi untuk Perubahan
Kemitraan	Kemandirian	Pengambilan Keputusan yang Rasional
Motivasi	Kerjasama	
Keberlanjutan	Partisipasi	
Berorientasi pada orang	Pribadi dan politik	
Kerangka kerja	Kepemilikan komunitas	
Mobilisasi	Hak Asasi Manusia	
Keadian sosial	Ketidaktergantungan pada pemerintah	
Pelaku etis	Tujuan dan visi	
	Pembangunan bersifat organik	
	Kecepatan gerak pembangunan	
	Keahlian pihak luar	
	Membangun komunitas	
	Proses dan hasilnya	
	Keterpaduan proses	
	Tanpa kekerasan	
	Inklusif	
	Konsensus	
	Pengembangan terpadu	
	Konfrontasi dengan kebatilan struktural	
	Mendefinisikan kebutuhan	

Sumber: Berbagai literatur (data di olah)

Dalam penerapannya di masyarakat *community development* atau pengembangan masyarakat sebagai suatu hal yang kompleks dan memiliki disiplin ilmu serta berbagai segi aspek. Fokus *community development* atau pengembangan masyarakat tidak hanya pada pembangunan fisik, melainkan juga perlu adanya pengembangan di sektor lain yaitu sektor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal. *Community development* atau pengembangan masyarakat adalah suatu proses di mana sebuah kelompok masyarakat

bergabung dengan personel pemerintah beserta pemangku kepentingan lain yang bertujuan pada peningkatan keadaan sosial ekonomi dan budaya anggota masyarakat tersebut. Kelompok komunitas atau komunitas ini merupakan orang-orang dengan ketertarikan yang sama, tetapi manusia itu cara berpikirnya berbeda dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Dua orang mungkin tidak berpikir atau beraksi dengan langkah yang sama pada kondisi yang sama. Situasi ini perlunya prinsip serta nilai yang dijadikan sebagai landasan keberadaan anggota masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan pembangunan.⁷²

Dalam melaksanakan kegiatan *community development* atau pengembangan masyarakat, prinsip-prinsip *community development* atau pengembangan masyarakat inilah yang nantinya akan memudahkan kegiatan *community development* atau pengembangan masyarakat, prinsip-prinsip tersebut akan terus dikembangkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meraih hasil maksimal. Prinsip-prinsip utama menjadi pemandu peserta pengembangan masyarakat untuk menciptakan kelompok masyarakat yang fleksibel dan dinamis atau proses pelibatan dan tindakan masyarakat.⁷³

Pada penelitian ini, menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan asumsi dari Latopa dan Saidu (2015), Jim Ife (1995), dan Green dan Haines (2002) yang telah di elaborasi. Hasil elaborasi teori tersebut menghasilkan 6 dimensi berikut: motivasi, partisipasi, pemberdayaan, kemandirian, kemitraan, dan keberlanjutan. Keenam dimensi tersebut akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan serta dianggap relevan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat Desa dilihat dari Perspektif Community Development: Studi Pada Badan Usaha Milik Desa “Lestari” Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

⁷² Phillips, and Robert H. Pittman. 2009. *An Introduction To Community Development*. USA : Taylor and Francis e-library.

⁷³ *Ibid.* hal 20.

I.5.2 Prinsip *Community Development* dalam Pemberdayaan Masyarakat

Community Development dapat diartikan sebagai upaya terpadu antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai bidang, yang menjadikan masyarakat lebih mandiri. Jika dikaitkan dengan peran Pembangunan Desa, *Community Development* jelas diupayakan supaya masyarakat bisa menambah kemandirian dan kapasitas mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang sekitar. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Dengan Undang-undang NO. 6 Tahun 2014, pemerintah desa membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna memaksimalkan semua potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan manusia. Hal ini guna menghasilkan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sumber daya manusia sangatlah penting pada pelaksanaa kegiatan organisasi, sumber daya manusia berperan sebagai perencana dan aktor dalam setiap aktivitas pelaksanaan organisasi tersebut, begitu pula halnya dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa.⁷⁴ Disadari bahwa sangat penting sumber daya manusia dalam memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa harus ada langkah nyata yang harus dilakukan untuk lebih memberdayakan sumber daya manusia yang ada.

Community development merupakan cara pandang yang dapat digunakan untuk melihat respon dan partisipasi masyarakat terhadap program-program Badan Usaha Milik Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya program Badan Usaha Milik Desa dari pemerintah yang memperhatikan prinsip pengembangan masyarakat maka program tersebut berkembang dan masyarakat juga merasakan manfaat dan keuntungannya.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa masyarakat memiliki tempat yang penting dalam program Badan Usaha Milik Desa, karena ketika masyarakat berkembang

⁷⁴ Geraldny Untu et al. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Di Desa Guuan Kecamatan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 4, No 50, 2018.

melalui *community development* maka akan menciptakan kemandirian masyarakat sehingga bisa memutuskan sikap dalam penggunaan sumber daya yang ada, dimana pada konteks ini yaitu sumber daya alam yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dapat dirawat dan dimanfaatkan.

I.6 Definisi Konsep

Definisi konsep tersusun atas pengertian-pengertian yang dapat memudahkan pemahaman konsep-konsep yang berada dalam penelitian ini. Berikut merupakan definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini;

1. *Community Development*

Proses peningkatan semua aspek kehidupan masyarakat dengan membangun kemandirian masyarakat dan memperkuat ikatan kelembagaan, sehingga meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat.

2. Motivasi

Suatu dorongan yang membuat masyarakat desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ingin terlibat aktif dalam proses pengembangan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan. Dalam penelitian ini, prinsip motivasi ini dimanfaatkan untuk melihat jenis motivasi yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

3. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar secara aktif pada seluruh aktivitas komunitasnya perlu di dukung dengan kemungkinan ataupun ruang. Dengan demikian, masyarakat desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dapat menyampaikan semua pendapat atau idenya dalam usaha mengatasi sejumlah masalah guna memajukan komunitasnya serta memastikan keberjalanan pengembangan masyarakat tersebut meraih tujuan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, prinsip partisipasi dipakai guna melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam Badan Usaha Milik Desa Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

4. Pemberdayaan

Suatu usaha dalam meningkatkan kemampuan masyarakat desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar melalui proses pendampingan kepada masyarakat seperti pemberian kesempatan, sumber atau ketrampilan supaya masyarakat bisa mengatasi sebuah masalah yang dihadapi yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam penelitian ini, prinsip pemberdayaan digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan dalam Badan Usaha Milik Desa Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

5. Kemandirian

Suatu kunci dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan masyarakat sehingga akan melahirkan kesadaran masyarakat desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam melakukan identifikasi lingkungan sekitar dan menyelesaikan masalah menjadi hal yang krusial. Dalam penelitian ini, prinsip kemandirian ini digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat bisa menggunakan sumberdaya sebaik mungkin guna mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan dengan berusaha menggunakan potensi lokal setelah adanya Badan Usaha Milik Desa Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

6. Kemitraan

Strategi kerjasama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini, prinsip kemitraan digunakan untuk melihat bagaimana kemitraan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

7. Keberlanjutan

Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dalam pemanfaatannya harus mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya tersebut agar dapat digunakan dalam jangka panjang sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini,

prinsip keberlanjutan ini digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah Badan Usaha Milik Desa “Lestari” Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar mempunyai rencana dan tujuan jangka panjang atau tidak, karena pada dasarnya setiap program pembangunan harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan.

I.7 Metode Penelitian

Metode penelitian bisa diartikan secara sederhana sebagai cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ini dapat membantu peneliti untuk menjelaskan proses penelitian secara sistematis, hal tersebut sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Neuman. Neuman berpendapat bahwa metode merujuk pada teknik khusus peneliti untuk memilih kasus atau bisa disebut permasalahan, mengukur dan mengobservasi kehidupan sosial, mengumpulkan dan memperbaiki data, menganalisis data dan melaporkan hasil.⁷⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, disini peneliti menggali dan memahami makna dari fenomena sosial yang ada. Penelitian kualitatif ini berusaha memahami situasi, peristiwa, peran, kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Locke, Spirdusi & Silverman, 1987).⁷⁶ Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif ini berupa data deskriptif, meliputi kata-kata lisan dan tulisan serta tindakan dari yang diamati (Taylor dan Bogdan, 1984:5).⁷⁷ Metode penelitian kualitatif digunakan dengan harapan dapat memahami suatu fenomena secara mendalam melalui gambaran holistik dan pemaknaan yang mendalam yaitu memahami secara mendalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa untuk “Lestari”

⁷⁵ W. Lawrence Neuman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh Edition)*, Pearson Education Limited, USA. hal 2.

⁷⁶ J.W. Creswell. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka pelajar. hal 4.

⁷⁷ Suryanto, Bagong dan Sutinah, 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenamedia Group. hal 166.

meningkatkan kualitas masyarakat di Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dilihat dari prinsip-prinsip *community development*.

I.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, berdasarkan metode penelitian yang telah diuraikan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, gejala, atau situasi⁷⁸ sehingga dalam penerapannya dapat menggambarkan apa yang mungkin ada dalam keadaan tertentu. Dalam penelitian deskriptif, informasi yang diperoleh berasal dari informan di lapangan dan tidak mengandalkan pengukuran dengan menggunakan angka. Tipe penelitian deskriptif dipenelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan atau menyajikan gambar secara rinci terkait proses pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dilihat dari prinsip-prinsip *community development*.

I.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana objek penelitian bisa ditemukan. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Usaha Milik Desa “Lestasi” Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah bahwa Badan Usahan Milik Desa Lestari dengan anggaran dana kecil yang bisa berkembang, dan juga mendapatkan kategori desa terbaik I dalam lomba Badan Usaha Milik Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur dengan usaha jasa persewaan kios, wisata edukasi, serta produk dan perdagangan (olahan buah).

I.7.3 Teknik Penentuan Informan

Hal yang diutamakan dalam penelitian kualitatif adalah keleluasaan cakupan rentangan informasi dan menyebut sumber informasi sebagai informan. Dalam penelitian kualitatif penentuan informan salah satu aspek penting dikarenakan informan ini sumber informasi sehingga banyak informasi yang harus diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

⁷⁸ Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. hal 234.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yang bertujuan untuk mengidentifikasi informan yang dipilih pihak-pihak yang diyakini mengetahui dan memahami permasalahan dalam penelitian ini.⁷⁹ Tujuan dari menentukan informan secara *purposive* adalah untuk memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang dimungkinkan ada serta mengetahui dan mengulas lebih dalam terkait proses pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dilihat dari prinsip-prinsip *community development*.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan informan yang secara langsung terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa “Lestari” Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Penentuan informan selanjutnya menggunakan teknik *snowball sampling* dimana peneliti menentukan informan selanjutnya berdasarkan rekomendasi informan utama untuk memperoleh informasi terkait penelitian.

Berikut di bawah ini adalah informan-informan yang telah diwawancarai oleh peneliti:

1. Mustainudin, S.Ag sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa “Lestari”
2. Dwi Nita Futika Sari, S.Pd sebagai Sekertaris Badan Usaha Milik Desa “Lestari”
3. Eny Srifatmawati sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa “Lestari”
4. Ibu Erviana (Pengolah buah hasil panen)
5. Ibu Sulastri (Pengolah buah hasil panen)
6. Ibu Titin Tresnawati (Pemandu wisata dan Anggota Kelompok Sadar Wisata)
7. Bapak Muhfid Rahardja (Pengelola Kampung Jambu)
8. Bapak Abid (Pengelola Kebun Blimbing)
9. Ibu Diah (Pengelola Kawasan Rumah Pangan Lestari)

⁷⁹ J.W. Creswell. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka pelajar. hal 166.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang langsung dan lebih mendetail tentang fenomena sosial yang terjadi di lapangan, sehingga memudahkan penelitian yang akurat dan efisien, oleh karena itu harus mahir dalam pengumpulan data. Dalam kegiatan pengumpulan data, teknik pengumpulan data harus benar-benar diperhatikan, karena data tersebut akan dianalisis kemudian diinterpretasikan secara mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan empat jenis pengumpulan data menurut Creswell, Creswell berpendapat bahwa prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari empat jenis,⁸⁰ yaitu:

I.7.4.1 Wawancara

Wawancara atau metode wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan informan melalui tatap muka, telepon atau partisipasi dalam *focus group interview*.⁸¹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur merupakan proses wawancara yang seluruh pertanyaan sudah dirancang sebelumnya.⁸² Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang secara langsung terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa “Lestari” Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa informan yang telah disampaikan dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah untuk dipahami oleh peneliti.

I.7.4.2 Observasi

Metode observasi merupakan suatu proses pengumpulan data oleh peneliti yang melakukan perjalanan langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian.⁸³ Peneliti berperan sebagai salah satu dari pengunjung untuk melihat dan mengamati kegiatan yang telah berlangsung, kondisi dan lingkungan sekitar termasuk prasarana fasilitas yang terdapat dalam program

⁸⁰ *Ibid.* hal 166.

⁸¹ *Ibid.* hal 254.

⁸² Nasution. 2011. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

⁸³ J.W. Creswell. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka pelajar. hal 254.

Badan Usaha Milik Desa “Lestari” sebagai hal penunjang yang dapat dicatat peneliti untuk memperoleh data dan informasi primer yang relevan dan mendukung data lainnya. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan fakta kondisi lingkungan program Badan Usaha Milik Desa “Lestari”.

I.7.4.3 Studi Dokumen

Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan data atau informasi dengan mengumpulkan dokumen publik atau pribadi yang terkait dengan fenomena permasalahan penelitian. Dokumen publik berupa dalam bentuk surat kabar, makalah, laporan kantor, sedangkan dokumen pribadi berupa dalam bentuk buku harian, buku harian, surat, dan e-mail.⁸⁴ Dalam penelitian ini, dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut ;

1. Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
3. Profil BUMDes “LESTARI” Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

I.7.4.4 Materi Audio dan Visual

Pengumpulan data jenis terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah berupa pengambilan foto, dan audio wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan gambar dan rekaman suara saat sedang melakukan wawancara dan observasi dengan tujuan untuk menambah kredibilitas penelitian yang akan dilampirkan.

I.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan hal yang kritis. Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga

⁸⁴ *Ibid.* hal 255.

hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Dalam penelitian yang menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai. Menurut Miles dan Huberman, model analisis interaktif terdiri dari tiga jalur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data atau informasi yang diperoleh di lapangan. Data dapat direduksi dengan menulis catatan kecil, mengkode, meringkas, atau membuat poin-poin yang dapat menyederhanakan data. Data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut pada saat dibutuhkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang didapat secara rapi dan mudah dipahami sehingga memungkinkan agar seorang menarik kesimpulan yang ada. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, permulaan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat secara keseluruhan atau sebagian dari data penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Fase ini adalah di mana data informasi yang diberikan selama penelitian divalidasi atau ditinjau. Hasil dari proses validasi adalah peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat ditafsirkan dengan validitas yang kuat. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diakhiri dengan penemuan-penemuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang objek yang sebelumnya masih abstrak menjadi jelas setelah dilakukan penelitian, dapat berupa interaksi, hipotesis atau teori.

I.7.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data menggunakan prosedur tertentu untuk menguji hasil penelitian dan kemudian menunjukkan konsistensi metode yang digunakan

dalam proyek lain.⁸⁵ Teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yaitu suatu teknik untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Penerapan triangulasi data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara membandingkan data antara satu informan dengan informan lainnya.

⁸⁵ J.W. Creswell. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka pelajar. hal 269.